

**Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Perindagkop dan UKM**

NO.	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA HITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA					KONDISI AKHIR
					2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase laju Pertumbuhan Koperasi sehat	Koperasi sehat adalah Koperasi yang dalam 2 (dua) tahun terakhir secara berturut - turut mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota	Data Koperasi sehat	7 Koperasi	2 %	3%	4%	5%	6%	6%
2	Persentase laju Pertumbuhan UMKM	Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha	Data Jumlah Usaha Mikro	2,40 %	2,40%	2,41%	2,43%	2,45%	2,46%	2,46%

# **PEMERINTAH KOTA PARIAMAN**



## **RENSTRA 2018 -2023 DINAS PERINDAGKOP DAN UKM**

**DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN  
KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH  
KOTA PARIAMAN**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala Rahmat dan Hidayah Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Disperindagkop dan Ukm Kota Pariaman Tahun 2018-2023 ini dapat diselesaikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Renstra Disperindagkop dan Ukm Kota Pariaman Tahun 2018-2023 adalah sebagai implementasi dari amanat Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Selain itu dalam rangka akuntabilitas kinerja kepada masyarakat, Renstra ini juga dilakukan perumusan indikator kinerja yang lebih terukur dan rasional guna akselerasi pencapaian kinerja Walikota sesuai visi dan misi yang ditetapkan pada akhir masa jabatan. Indikator kinerja yang terukur akan lebih mudah dipahami, mudah dalam evaluasi capaiannya secara periodik sehingga juga mudah pengukuran keberhasilan pencapaiannya.

Akhirnya dokumen ini akan menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan Disperindagkop dan Ukm guna mencapai tujuan dan sasaran melalui indikator kinerja Disperindagkop dan Ukm dalam rangka pencapaian visi misi daerah sesuai RPJMD. Segala kekurangan dalam Renstra ini kami sampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya.



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Landasan Hukum.....	2
1.3    Maksud dan Tujuan .....	3
1.3.1    Maksud.....	3
1.3.2    Tujuan .....	4
1.4    Sistematika Penulisan.....	4
BAB I    PENDAHULUAN.....	4
BAB II.....	6
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM .....	6
KOTA PARIAMAN .....	6
2.1.    Tugas Pokok dan Fungsi dan Struktur Organisasi .....	6
2.2.    Sumber Daya SKPD .....	15
2.2.1.    Kepegawaian.....	15
2.2.2.    Sarana dan Prasarana.....	17
2.3.    Kinerja Pelayanan SKPD .....	19
2.3.1.    Sektor Koperasi.....	19
2.3.2.    Sektor UMKM .....	10
2.3.3.    Sektor Industri.....	11
2.3.4.    Sektor Perdagangan.....	12
2.4.    Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD .....	12
BAB III .....	32
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN .....	32
TUGAS DAN FUNGSI .....	32
3.1.    Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perindagkop dan UKM .....	32

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	33
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kab/Kota.....	34
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	40
3.5. Penentuan Isu –Isu Strategis Dinas .....	45
BAB IV .....	47
TUJUAN DAN SASARAN.....	47
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perindagkop dan UKM .....	47
BAB V.....	36
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	36
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perindagkop dan UKM.....	36
BAB VI .....	41
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF .....	41
BAB VII.....	45
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	45
BAB VIII.....	50
PENUTUP.....	50
8.1. PEDOMAN TRANSISI RKPD TAHUN 2024.....	50
8.2. KAIDAH PELAKSANAAN.....	51
8.3. PENGENDALIAN DAN EVALUASI .....	52

## DAFTAR TABEL

Bagan 1 Struktur Organisasi Disperindagkop dan Ukm Kota Pariaman .....	6
Tabel 2. 1 Jumlah Pns/CPNS dan Pegawai Harian Disperindagkop dan.....	15
Tabel 2. 2 Jumlah PNS Menurut Golongan .....	15
Tabel 2. 3 Jumlah PNS Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman .....	16
Tabel 2. 4 Jumlah PNS UPT Pengelola Pasar Kota Pariaman Menurut .....	16
Tabel 2. 5 Sarana dan Prasarana pada Dinas Perindagkop dan UKM .....	17
Tabel 2. 6 Sarana dan Prasarana pada UPT Pengelola Pasar .....	19
Tabel 2. 7 Kondisi Koperasi Kota Pariaman tahun 2013-2018 .....	8
Tabel 2. 8 Perkuatan Permodalan Untuk Koperasi .....	8
Tabel 2. 9 Daftar Koperasi Berprestasi .....	9
Tabel 2. 10 Kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah .....	10
Tabel 2. 11 Rekapitulasi Jumlah UMKM Kota Pariaman Tahun 2018 .....	10
Tabel 2. 12 Perkembangan Industri Kota Pariaman.....	11
Tabel 2. 13 Sarana dan Prasarana Perdagangan Kota Pariaman .....	12
Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah .....	32
Tabel 5. 1 Strategi dan Arah Kebijakan .....	38
Tabel 6. 1 Program dan Kegiatan Dinas Perindagkop dan UKM .....	41
Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Perindagkop dan UKM.....	46

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan arah program dan kegiatan yang komprehensif dalam menghadapi tantangan perubahan dan isu-isu dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Secara umum, Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharapkan dapat menjawab dua hal yang mendasar, yaitu arah pelayanan yang akan dikembangkan serta yang ingin dicapai dalam lima tahun kedepan dan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program, setiap organisasi pemerintah khususnya organisasi perangkat daerah perlu menyusun perencanaan strategis. Perencanaan strategis merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis daerah, nasional maupun global. Dengan demikian, perencanaan srategis disusun melalui proses secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dari pembuatan keputusan terutama dalam rangka meningkatkan efisiensi serta efektifitas organisasi sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Renstra Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman ini berisi Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman yang kemudian dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2018-2023.

Disusunnya Rencana Strategis Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman Tahun 2018 – 2023 ini sangat penting artinya bagi pimpinan, staf dan stakeholder terkait. Dokumen ini merupakan patokan untuk merumuskan tugas dan fungsi dinas sekaligus mengendalikan arah dinas itu sendiri. Oleh sebab itu Renstra Dinas diharapkan dapat membantu memberikan panduan dan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh. Renstra ini akan dapat dijadikan tolok ukur

sejauh mana Dinas Perindagkop dan UKM telah menjalankan visi dan misi yang diembannya.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dalam penyusunan Renstra Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman, dasar hukum yang digunakan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
2. Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
7. Surat Edaran Mendagri No. 050/2020/SJ tahun 2005 perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 151 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 10 tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2010 – 2014;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2010 – 2014;
14. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 56);
15. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2012 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2012-2014;
16. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pariaman Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012, Nomor 140);
17. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pariaman Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2014, Nomor 165);
18. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pariaman Tahun 2018-2023;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan Renstra Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman adalah sebagai berikut :

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman ini adalah:

1. Sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Pariaman.

2. Untuk dijadikan sebagai pedoman/acuan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman.
3. Sebagai acuan untuk mengukur akuntabilitas kinerja organisasi.

### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman ini adalah:

1. Sebagai upaya dalam menyusun tujuan dan sasaran serta strategi Dinas Perindagkop dan UKM yang merupakan jabaran dari Visi dan Misi Kota Pariaman.
2. Dalam rangka merumuskan tujuan dan sasaran organisasi.
3. Menjabarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman dengan memperhitungkan faktor internal dan eksternal, dalam bentuk strategi kebijakan dan program.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Renstra Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

- 2.1 Tugas Pokok dan Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya SKPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan SKPD

BAB III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Pelayanan SOPD
3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi / Kabupaten /Kota
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5	Penentuan Isu – Isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VI	INDIKATOR KINERJA SOPD YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

## **BAB II**

# **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KOTA PARIAMAN**

### **2.1. Tugas Pokok dan Fungsi dan Struktur Organisasi**

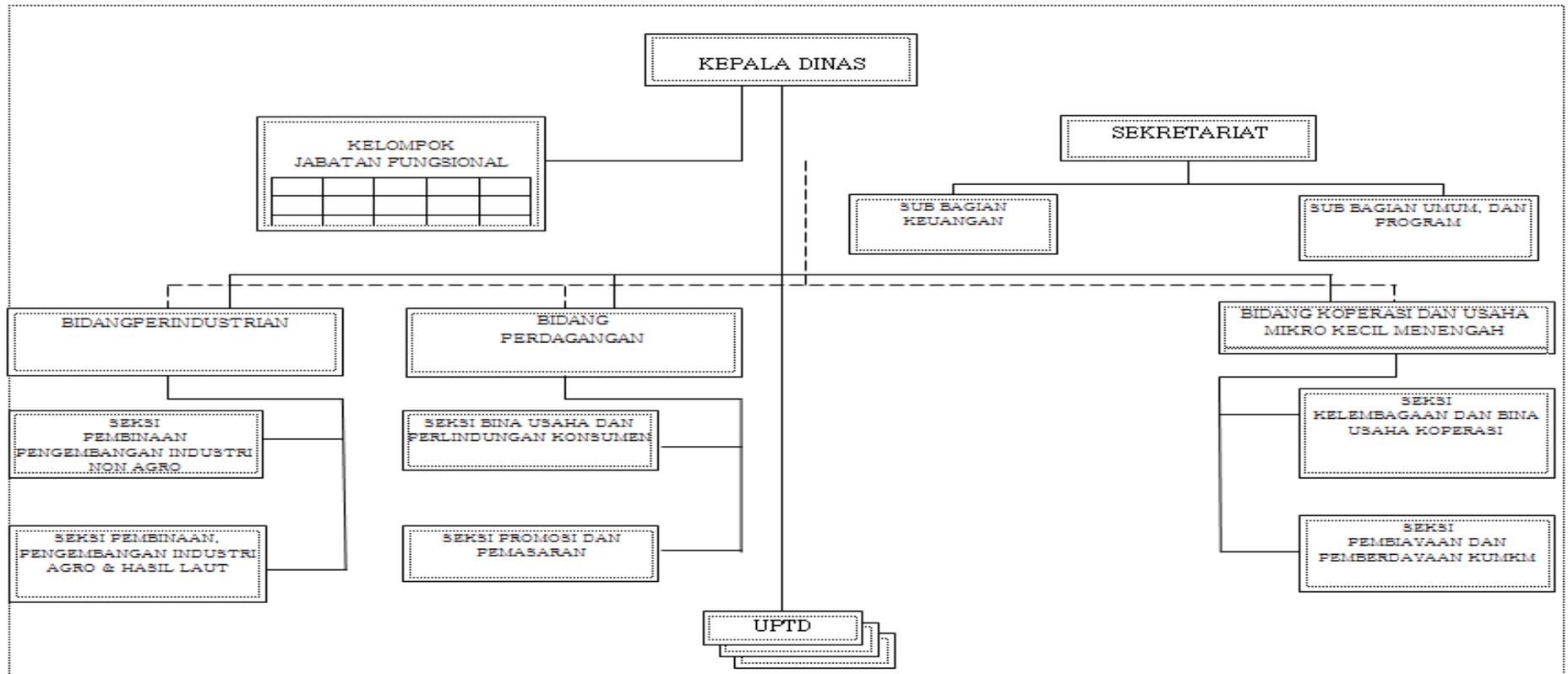
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman No. 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman, maka Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pariaman adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan sebagian urusan wajib dan sebagian urusan pilihan yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah yaitu di Bidang Perindustrian, Perdagangan , Koperasi dan UKM.

Susunan Organisasi Dinas Perindagkop dan UKM terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum dan Program;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
3. Bidang Koperasi dan UMKM, membawahi :
  - a. Seksi Kelembagaan dan Bina Usaha Koperasi.
  - b. Seksi Pembiayaan dan Pemberdayaan KUMKM
4. Bidang Perindustrian, membawahi :
  - a. Seksi Pembinaan, Pengembangan Industri Agro dan Hasil Laut.
  - b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Non Agro.
5. Bidang Perdagangan
  - a. Seksi Promosi dan Pemasaran.
  - b. Seksi Bina Usaha dan Perlindungan Konsumen
6. UPTD; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagan 1 Struktur Organisasi Disperindagkop dan Ukm Kota Pariaman**



Tugas masing - masing bidang pada Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman akan dijelaskan sebagai berikut :

### **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun dan merumuskan kebijakan teknis sebagai pedoman untuk penyelenggaraan kegiatan Dinas meliputi pembinaan dan penataan ketatausahaan, penyusunan program bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.
- b. Mengkoordinasikan Sekretaris, para Kepala Bidang, Kepala UPTD dan kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas.
- c. Membagi tugas kepada Sekretaris, para Kepala Bidang, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang permasalahannya.
- d. Mengarahkan Sekretaris, para Kepala Bidang, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas agar melaksanakan tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretaris, para Kepala Bidang, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional guna mengetahui perkembangan dan permasalahannya.
- f. Merumuskan masalah yang timbul dilingkungan dinas untuk merumuskan konsep lebih lanjut.
- g. Mengkoordinasikan dengan unit kerja terkait penyusunan dan perumusan kegiatan dinas baik rutin maupun pembangunan agar terdapat kesesuaian dalam penetapannya.
- h. Meneliti dan memaraf konsep serta menandatangani surat yang menjadi kewenangannya berdasarkan data dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- i. Memberi saran kepada atasan mengenai permasalahan dibidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebagai bahan informasi dalam pengambilan keputusan.

- j. Membuat laporan kegiatan dinas secara periodik dengan membuat data, informasi dan laporan setiap bagian, bidang, UPTD dan kelompok jabatan fungsional untuk disampaikan kepada atasan.
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh walikota baik lisan maupun tertulis.

## **2. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di Lingkungan Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman yang meliputi urusan umum, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Uraian tugas Sekretaris Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis (RENSTRA) dan (RENJA) Dinas.
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Program dan Sub Bagaian Keuangan.
- c. Mengkoordinasikan setiap bidang dalam penyusunan LPPD, LKPJ, LKjIP dan segala bentuk laporan lainnya.
- d. Merumuskan program dan kegiatan lingkup sekretariat.
- e. Menyelenggarakan administrasi keuangan dan aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Mengkoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan dari setiap bidang.
- g. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan ketatausahaan pada Dinas.
- h. Menganalisa kebutuhan pegawai pada Dinas.
- i. Menganalisa kebutuhan pegawai pada Dinas.
- j. Membagi seluruh pelaksana Dinas untuk ditempatkan pada setiap bidang sesuai kebutuhan dan keahlian.
- k. Menganalisa kebutuhan, memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana.

- l. Membagi tugas, member petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- m. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan
- n. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan.
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Program;
- b. Sub Bagian Keuangan;

### **3. Bidang Koperasi dan UMKM**

Bidang Koperasi mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan sebagian tugas Dinas di Bidang Koperasi dan UMKM.

Uraian Tugas Kepala Bidang Koperasi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Koperasi dan UMKM baik rutin maupun pembangunan serta sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan pembinaan dan penataan Bidang Koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Membagi tugas kepada Kasi dilingkungan Bidang Koperasi dan UMKM sesuai dengan bidang tugasnya melalui disposisi atau secara lisan.
- c. Memberi petunjuk kepada Kasi dan bawahan dilingkungan Bidang Koperasi dan UMKM sesuai dengan permasalahan yang dihadapi agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.
- d. Mengkoordinasikan para Kasi dilingkungan Bidang Koperasi dan UMKM melalui rapat atau langsung agar terjalin kerjasama yang saling mendukung dalam pelaksanaan tugas.
- e. Memeriksa hasil kerja dan menilai prestasi kerja kasi di lingkungan Bidang Koperasi dan UMKM agar sesuai dengan rencana dan sebagai bahan pembinaan dan peningkatan karir.

- f. Mengadakan kerjasama dengan unit kerja pelaksana dan pendukung pengumpulan, pengolahan, analisis data dan penelitian dalam rangka pengembangan program peningkatan Bidang Koperasi dan UMKM.
- g. Memantau pelaksanaan kegiatan Bidang Koperasi dan UMKM agar berjalan sesuai rencana.
- h. Memberi konsultasi kepada unit kerja terkait agar terdapat pemahaman yang sepadan dalam melaksanakan kegiatan Bidang Koperasi dan UMKM.
- i. Memberi saran kepada atasan mengenai permasalahan di Bidang Koperasi dan UMKM sebagai bahan informasi dalam pengambilan keputusan.
- j. Menyusun dan membuat laporan kegiatan Bidang Koperasi dan UMKM baik rutin maupun pembangunan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Koperasi dan UMKM terdiri dari :

- a. Seksi Kelembagaan dan Bina Usaha Koperasi.
- b. Seksi Pembiayaan dan Pemberdayaan KUMKM.

#### **4. Bidang Perindustrian**

Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan sebagian tugas Dinas di Bidang Perindustrian.

Kepala Bidang Perindustrian memiliki tugas, sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Perindustrian baik rutin maupun pembangunan serta sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan pembinaan dan penataan Bidang Perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Membagi tugas kepada Kasi dilingkungan Bidang Perindustrian sesuai dengan bidang tugasnya melalui disposisi atau secara lisan.

- c. Memberi petunjuk kepada Kasi dan bawahan dilingkungan Bidang Perindustrian sesuai dengan permasalahan yang dihadapi agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.
- d. Mengkoordinasikan para Kasi dilingkungan Bidang Perindustrian melalui rapat atau langsung agar terjalin kerjasama yang saling mendukung dalam pelaksanaan tugas.
- e. Memeriksa hasil kerja dan menilai prestasi kerja kasi di lingkungan Bidang Perindustrian agar sesuai dengan rencana dan sebagai bahan pembinaan dan peningkatan karir.
- f. Mengadakan kerjasama dengan unit kerja pelaksana dan pendukung pengumpulan, pengolahan, analisis data dan penelitian dalam rangka pengembangan program peningkatan Bidang Perindustrian.
- g. Memantau pelaksanaan kegiatan Bidang Perindustrian agar berjalan sesuai rencana.
- h. Memberi konsultasi kepada unit kerja terkait agar terdapat pemahaman yang sepadan dalam melaksanakan kegiatan Bidang Perindustrian.
- i. Memberi saran kepada atasan mengenai permasalahan di Bidang Perindustrian sebagai bahan informasi dalam pengambilan keputusan.
- j. Menyusun dan membuat laporan kegiatan Bidang Perindustrian baik rutin maupun pembangunan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Perindustrian terdiri dari :

- a. Seksi Pembinaan, Pengembangan Industri Agro dan Hasil Laut.
- b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Non Agro.

## **5. Bidang Perdagangan**

Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan sebagian tugas dinas di Bidang Perdagangan.

Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Perdagangan baik rutin maupun pembangunan serta sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan pembinaan dan penataan Bidang Perdagangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Membagi tugas kepada Kasi dilingkungan Bidang Perdagangan sesuai dengan bidang tugasnya melalui disposisi atau secara lisan.
- c. Memberi petunjuk kepada Kasi dan bawahan dilingkungan Bidang Perdagangan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.
- d. Mengkoordinasikan para Kasi dilingkungan Bidang Perdagangan melalui rapat atau langsung agar terjalin kerjasama yang saling mendukung dalam pelaksanaan tugas.
- e. Memeriksa hasil kerja dan menilai prestasi kerja kasi di lingkungan Bidang Perdagangan agar sesuai dengan rencana dan sebagai bahan pembinaan dan peningkatan karir.
- f. Mengadakan kerjasama dengan unit kerja pelaksana dan pendukung pengumpulan, pengolahan, analisis data dan penelitian dalam rangka pengembangan program peningkatan Bidang Perdagangan.
- g. Memantau pelaksanaan kegiatan Bidang Perdagangan agar berjalan sesuai rencana.
- h. Memberi konsultasi kepada unit kerja terkait agar terdapat pemahaman yang sepadan dalam melaksanakan kegiatan Bidang Perdagangan.
- i. Memberi saran kepada atasan mengenai permasalahan di Bidang Perdagangan sebagai bahan informasi dalam pengambilan keputusan.
- j. Menyusun dan membuat laporan kegiatan Bidang Perdagangan baik rutin maupun pembangunan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Perdagangan terdiri dari :

- a. Seksi Promosi dan Pemasaran.
- b. Seksi Bina Usaha dan Perlindungan Konsumen

## **6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindagkop dan UKM (UPTD)**

Menurut Peraturan Walikota Pariaman No : 7 Tahun 2017 tentang Nomenklatur, Jumlah dan Jenis, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemerintah Kota Pariaman, Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindagkop dan UKM adalah **Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pasar** dan **Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal**.

### **UPT Pengelola Pasar**

Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis, operasional dan atau kegiatan penunjang di bidang Pengelolaan Pasar.

Fungsi dari UPT Pengelola Pasar :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis Operasional di Bidang Pengelolaan Pasar.
- b. Pelaksana Administrasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar.
- c. Pelaksana Pengelolaan Pasar.
- d. Pengkoordinasian Pengelolaan Pasar.
- e. Pengawasan dan Pengendalian Pasar.
- f. Pelaksana Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

### **UPT Metrologi Legal**

Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis, operasional dan atau kegiatan penunjang di bidang Metrologi Legal.

Fungsi dari UPT Metrologi Legal :

- a. Merencanakan pengelolaan pelayanan tera, tera ulang dan pengawasan serta pelayanan kemetrologian lainnya.
- b. Merencanakan pengelolaan dan pemeliharaan instrument peralatan standard dan laboratorium serta sarana prasaranan pelayanan metrologi legal.
- c. Melaksanakan dan mengembangkan sistem manajemen mutu metrologi legal serta *surveillance* metrologi.

- d. Pelaporan hasil kegiatan penyelenggara metrologi legal dan standardisasi.

## 2.2. Sumber Daya SKPD

### 2.2.1. Kepegawaian

Kondisi pegawai Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman berdasarkan status kepegawaian, dapat dilihat pada Tabel 2.1, Tabel 2.2 , Tabel 2.3 dan Tabel 2.4 berikut :

**Tabel 2.1 Jumlah Pns/CPNS dan Pegawai Harian Disperindagkop dan Ukm Kota Pariaman Tahun 2018**

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah	%
		Laki-laki	Perempuan		
1.	Dinas Perindagkop dan UKM	15	11	26	74,29
2.	UPT Pengelola Pasar	3	3	6	17,14
3.	UPT Metrologi Legal	2	1	3	8,57
	<b>Jumlah</b>	20	15	35	100

**Tabel 2.2 Jumlah PNS Menurut Golongan**

No	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah	%
		Laki-laki	Perempuan		
1.	Dinas Perindagkop dan UKM				
	Golongan I	-	-	-	0
	Golongan II	1	0	1	2,86
	Golongan III	9	10	19	54,29
	Golongan IV	5	1	6	17,4

2.	UPT P. Pasar				
	Golongan I	-	-	-	0
	Golongan II	2	1	3	8,57
	Golongan III	1	2	3	8,57
	Golongan IV	-	-	-	0
3.	UPT Metrologi				
	Golongan I	-	-	-	0
	Golongan II	0	1	1	2,86
	Golongan III	2	0	2	5,71
	Golongan IV	0	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	20	15	35	100

**Tabel 2.3 Jumlah PNS Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman Menurut Jenjang Pendidikan Formal.**

No	Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		JML	%
		Laki-laki	Perempuan		
1.	SLTA	0	0	0	0
2.	Sarjana Muda / D3	1	0	1	3,85
3.	Sarjana	9	8	17	65,38
4.	Pascasarjana (S2)	5	3	8	30,77
	<b>Jumlah</b>	15	11	26	100

**Tabel 2.4 Jumlah PNS UPT Pengelola Pasar Kota Pariaman Menurut Jenjang Pendidikan Formal**

No	Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		JML	%
		Laki-laki	Perempuan		

1.	SLTA	1	0	1	16,67
2.	Sarjana Muda / D3	1	1	2	33,33
3.	Sarjana	1	2	3	50,00
4.	Pascasarjana (S2)	-	-	-	0
	Jumlah	3	3	6	100

Pegawai / Aparatur Pemerintah menempati posisi strategis dan peran dominan dalam membawa Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman untuk mencapai tujuannya. Tujuan akan terwujud apabila didukung oleh aparatur yang handal dan profesional. Demikian penting dan strategisnya peran pegawai / aparatur ini menuntut diselenggarakannya manajemen sumber daya manusia secara baik, tepat dan terarah, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dan efektifitas Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman. Tanpa itu semua pegawai justru dapat menjadi sumber penyebab terjadinya pemborosan dan inefisiensi, dan sangat sulit untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

### 2.2.2. Sarana dan Prasarana

Perlengkapan kantor berupa sarana dan prasarana yang memadai secara kualitas maupun kuantitas, diperlukan sebagai unsur pendukung bagi kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman.

Kondisi sarana prasarana pendukung untuk kelancaran kinerja Dinas Perindagkop dan UKM dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.5 Sarana dan Prasarana pada Dinas Perindagkop dan UKM**

#### **Kota Pariaman.**

No	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah (Buah/ Unit)
1.	Mobil Dinas	2
2.	Kendaraan Roda Dua	9
3.	Papan White Board	4
4.	Papan Data Koperasi	2
5.	Papan Struktur / DUK	5

6.	Filling Cabinet	6
7.	Faksimili	1
8.	Meja telp	1
9.	Lemari kayu	9
10.	Meja biro	7
11.	Meja ½ biro	14
12.	Meja rapat	4
13.	Kursi tamu	2
14.	Kursi putar	15
15.	Kursi Eselon III	4
16.	Kursi Rapat	77
17.	Kamera digital	1
18.	Komputer	7
19.	Printer	10
20.	Mesin ketik	2
21.	Meja Komputer	6
22.	Lap Top	7
23.	LCD Projector	2
24.	Etalase	4
25.	Warles	1
26.	TV 21 Inch	1
27.	TV 32 Inch	1
28.	TV 42 Inc	1
29.	Kipas Angin	2
30.	AC	14
31.	Sound Sistem	1
32.	Layar LCD	1
33.	Patung untuk Pameran	4
34.	Dispenser	2

**Tabel 2. 6 Sarana dan Prasarana pada UPT Pengelola Pasar**

<b>No</b>	<b>Jenis Sarana Prasarana</b>	<b>Jumlah (Buah/ Unit)</b>
1.	Kendaraan Dinas Roda empat	1
2.	Kendaraan Roda Dua	1
3.	Gerobak	8
4.	Mesin Ketik	1
5.	Filling cabinet	1
6.	Meja ½ Biro	3
7.	AC	2
8.	Komputer	2
9.	Lap Top	1
10.	Printer	2
11.	Meja Kerja Kursi Kerja	3
12.	Lemari Arsip	5
13.	Meja Kerja	1
14.	Corong	3

### **2.3. Kinerja Pelayanan SKPD**

#### **2.3.1. Sektor Koperasi**

Kondisi Koperasi Kota Pariaman Tahun 2013 sampai tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.7 Kondisi Koperasi Kota Pariaman tahun 2013-2018**

NO	URAIAN	SATUAN	2013		2014		2015		2016		2017		2018 (keadaan Sep)	
			Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	JUMLAH KOPERASI	unit	84		85		82		82		72		76	
2	KOPERASI AKTIF	unit	57	67,9	59	69,4	60	73,2	62	75,61	61	84,72	65	85,53
3	KOPERASI TIDAK AKTIF	unit	27	32,1	26	30,6	22	26,8	20	24,39	11	15,28	11	14,47
4	KOPERASI RAT	unit	36	63,2	40	67,8	45	75	43	69,35	39	63,93	34	52,31
5	JUMLAH ANGGOTA	orang	10.060		10.178		8.692		9.016		8.591		8.722	
6	JUMLAH MODAL SENDIRI	Rp.	35.572.684		40.424.883		34.905.592		39.852.276		43.989.870		48.560.586	
7	JUMLAH MODAL LUAR	Rp.	37.131.717		29.544.436		19.370.366		16.848.396		17.213.813		16.870.584	
8	JUMLAH VOLUME	Rp.	45.429.918		50.595.673		37.497.169		44.775.451		51.755.342		55.483.841	

	USAHA												
9	ASET	Rp.	72.651.556		69.969.319		54.275.958		56.700.672		61.203.683		65.431.170
10	JUMLAH SHU	Rp.	2.271.594		2.663.154		2.725.180		3.244.660		3.873.031		4.176.114

\*) Persentase pertumbuhan dari tahun 2018 sampai 2023

Pada tabel diatas terlihat bahwa jumlah koperasi yang ada di Kota Pariaman sampai tahun 2018 berjumlah 76 unit turun sebesar 14 % dari tahun 2013. Sedangkan jumlah koperasi yang aktif dari tahun 2013 sampai tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 11 %. Jumlah modal sendiri koperasi pun dari tahun 2013 sampai tahun 2018 juga mengalami peningkatan sebesar 27 %. Volume usaha koperasi sampai tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 122 % sedangkan Sisa Hasil Usaha (SHU) sampai tahun 2018 juga mengalami peningkatan sebesar 84 %.

Dari 76 buah koperasi yang ada di Kota Pariaman, sebanyak 27 buah diantaranya tidak aktif. Untuk koperasi yang tidak aktif akan dilakukan proses revitalisasi. Dalam hal penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan (RAT), Koperasi di Kota Pariaman yang melakukan RAT tepat waktu pada tahun 2018 adalah sebanyak 34 atau 52,31 % dari koperasi yang aktif.

Mengenai pengelolaan dana perkuatan modal dan dana bergulir koperasi, setelah dievaluasi pengelolaannya masih belum berjalan dengan baik, sehingga sulit diukur kinerjanya. Dana-dana tersebut saat ini telah tersebar di beberapa koperasi di Kota Pariaman. Data tentang dana perkuatan permodalan dan dana bergulir koperasi tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.8.

**Tabel 2.8 Perkuatan Permodalan Untuk Koperasi**

No	Program	Jumlah Dana (Rp.)
1.	Dana Subsidi BBM (APBN)	775.000.000
2.	MAP untuk Sentra (APBN)	150.000.000
3.	Dana Pola Syariah (APBN)	50.000.000
4.	Dana Perkuatan Usaha Koperasi (Ayam Potong)	300.000.000
5.	(APBN)	250.000.000
6.	PKPS BBM (APBN)	680.000.000
7.	Dana Bergulir APBD Kota Pariaman	25.000.000
8.	Dana Hibah dari APBD Prop. Sumbar	300.000.000
	Dana Bansos dari Kementrian Koperasi	

Setiap tahunnya, Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman melakukan penilaian terhadap Koperasi yang ada di Kota Pariaman. Data mengenai Koperasi Berprestasi Kota Pariaman dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.9 Daftar Koperasi Berprestasi**

NO	TAHUN	NAMA KOPERASI	ALAMAT DESA/ KEL	BADAN HUKUM		Peringkat	TINGKAT			PKPRI
				NOMOR	TANGGAL		KOTA	PROVINSI	NASIONAL	SUMBER
1	2013	PRIMKOPOL KOTA PARIAMAN	ALAI GELOMBANG	22/BH/PPKU/2006	15 Desember 2006			HARAPAN III		
		KOPPAS APPSI	KAMPUNG PERAK	28/BH/III.12/KPP-2008	17 Februari 2008	I	√			
		KPRI SMKN 1 PARIAMAN	AIR SANTOK	137/PAD/KWK.3/II/97	17 Februari 1997	II	√			
		KSU TERATAI	TALUAK	21/BH/PPKU/2006	12 Desember 2006	III	√			
2	2014	KPRI PENDAKAR	LOHONG	518/03/PAD/KPP/IX/2003	23 September 2003	I	√	HARAPAN I		
		KSU TERTAI	TALUAK	21/BH/PPKU/2006	12 Desember 2006	II	√			
		KPN BINA KARYA	KAMPUNG BARU	653/PAD/KWK.3/IX/1997	19 September 1997	III	√			
		KPRI SMKN 1 PARIAMAN	AIR SANTOK	137/PAD/KWK.3/II/97	17 Februari 1997					HARAPAN III
3	2015	KPRI SMKN 1 PARIAMAN	AIR SANTOK	137/PAD/KWK.3/II/97	17 Februari 1997	I	√	√		
		PRIMKOPAD	TOBOH PALABAH	BH/101/PAD/KWK.3/IX/96	01 September 1996	II	√			
		AN-NUR KELAPA GADING	JALAN BARU	164/BH/KDK.35/IV/01	19 April 2001	III	√			
		KPRI PENDAKAR	LOHONG	518/03/PAD/KPP/IX/2003	23 September 2003					HARAPAN I
4	2016	PRIMKOPPOL	ALAI GELOMBANG	22/BH/PPKU/2006	15 Desember 2006	I	√	HARAPAN I	KOPERASI BERTASIS	HARAPAN III
		KPRI BINA KARYA	KAMPUNG BARU	653/PAD/KWK.3/IX/1997	19 September 1997	II	√			
		KSU TERATAI	TALUK	21/BH/PPKU/2006	12 Desember 2006	III	√			
5	2017	KPRI SMKN 1 PARIAMAN	AIR SANTOK	137/PAD/KWK.3/II/97	17 Februari 1997	I	√			
		KOPPAS APPSI	KAMPUNG PERAK	28/BH/III.12/KPP-2008	17 Februari 2008	II	√			
		KPN SMKN 3 PARIAMAN	MANGGUANG	25/BH/III.12/PPKU-2007	6 November 2007	III	√			

6	2018	KPRI PENDAKAR	Lohong	518/03/PAD/KPP/IX/2003	23/09/2003	I	√			
		KSU TERATAI	Taluk	21/BH/PPKU/2006	12/12/2006	II	√			
		KPN SMPN 3 PARIAMAN	Toboh Palabah	247/PAD/KWK.3/III/97		III	√			

### 2.3.2. Sektor UMKM

Peranan UMKM sangat strategis dalam perekonomian Kota Pariaman dan merupakan bagian terbesar dari pelaku Usaha di Kota Pariaman.

Sebagian besar kegiatan UMKM ini bergerak di sektor perdagangan eceran (formal dan informal), home industri, dan jasa.

**Tabel 2. 10 Kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah**

NO	URAIAN	KRITERIA	
		ASSET	OMZET
1	USAHA MIKRO	Max 50 Juta	Max 300 Juta
2	USAHA KECIL	> 50 - 500 Juta	> 300 Juta - 2,5 Milyar
3	USAHA MENENGAH	>500 Juta - 10 Milyar	> 2,5 - 50 Milyar

(Ref: UU RI No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM)

**Tabel 2. 11 Rekapitulasi Jumlah UMKM Kota Pariaman Tahun 2018**

NO	JENIS	JUMLAH UMKM	PERSENTASE	KET
1	USAHA MIKRO	6541	92,58	
2	USAHA KECIL	497	7,04	
3	USAHA MENENGAH	27	0,38	
<b>JUMLAH</b>		<b>7065</b>	<b>100</b>	

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar pelaku usaha di Kota Pariaman termasuk dalam kategori Usaha Mikro yaitu 92,58 %. Sisanya merupakan Usaha Kecil yaitu 7,04 % dan Usaha Menengah 0,38 %.

### 2.3.3. Sektor Industri

Kondisi sektor industri di Kota Pariaman sejak tahun 2013 sampai tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.10 :

**Tabel 2. 12 Perkembangan Industri Kota Pariaman**

No.	Uraian	Tahun					Pertumbuhan *) (%)
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	Jumlah Industri (unit)	1620	1647	1673	1702	1722	6,30
2	Jumlah Tenaga Kerja (Orang)	8696	8752	8821	9091	9034	3,89
3	Nilai Bahan Baku (Rp.000)	1.125.000	1.146.000	1.201.000	1.907.000	2.000.000	77,78
4	Nilai Produksi (Rp.000)	2.501.000	2.604.000	2.750.000	3.000.000	3.500.000	39,94
5	Nilai Investasi (Rp.000)	3.167.275	3.676.897	3.691.000	3.781.000	4.120.000	30,08

\*) Persentase Pertumbuhan dari tahun 2014 sampai 2018

Pada Tabel 2.10 dapat dilihat bahwa dari tahun 2014 sampai tahun 2018 terjadi peningkatan jumlah unit usaha sebesar 6,30 %. Jumlah tenaga kerja yang dapat diserap oleh sektor industri Kota Pariaman sampai tahun 2018 juga meningkat sebesar 3,89 %. Nilai bahan baku, nilai produksi dan nilai investasi dari tahun 2013 sampai tahun 2018 juga meningkat masing- masing sebesar 77, 78, 39,94% dan 30,08 %. Peningkatan yang cukup besar ini selain disebabkan karena pertumbuhan ekonomi lima tahun terakhir yang cukup baik namun juga disumbang oleh faktor inflasi dan kenaikan harga-harga.

Selain itu pada kurun waktu 2013 – 2018 telah dilakukan pembinaan terhadap industri - industri yang menghasilkan produk-produk unggulan Kota Pariaman seperti makanan ringan, bordir, sulaman benang emas, renda dari benang medan, dll.

### 2.3.4. Sektor Perdagangan

Kondisi sektor Perdagangan Kota Pariaman sejak tahun 2013 sampai tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.11 :

**Tabel 2. 13 Sarana dan Prasarana Perdagangan Kota Pariaman**

No.	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Pasar	7	7	7	7	7
2	Jumlah UTTP yang sudah di tera	960	809	948	954	1015
3	Jumlah pedagang yang menerima tenda gerobak	-	Tenda = 40 Orang, Gerobak = 35 Orang	Tenda = 60 Orang, Gerobak = 50 Orang	-	-
4	Jumlah Pedagang Yang Menerima Bantuan Cool Box	73	100	25	-	-
5	Jumlah Event Pameran/promosi yang telah diikuti	-	-	-	14	8

### 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Berdasarkan kinerja pelayanan yang disampaikan pada sub bab sebelumnya, dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi utamanya berkaitan dengan perumusan kebijakan teknis, pelayanan umum dan pembinaan serta pengembangan dibidang Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan di Kota Pariaman.

Analisis lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan menjadi landasan kritis dalam merancang strategi Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman, hal ini dilakukan melalui metode analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats*).

### **A. Kekuatan (*Strenghts*)**

1. Adanya komitmen Pimpinan dalam meningkatkan perekonomian rakyat.
2. Letak geografis Kota Pariaman sebagai jalur pelintasan, cukup strategis untuk mengembangkan Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan.
3. Dekat dengan Bandara Internasional Minangkabau (BIM), dapat ditempuh sekitar 30 (tiga puluh) menit dengan kendaraan pribadi.
4. Topografi daerah yang mendukung untuk bahan baku industri dan produk olahan.
5. Adanya keterampilan khusus dan merupakan keahlian pengrajin yang sudah turun temurun.
6. Adanya Sentra - Sentra Industri di Kota Pariaman.
7. Ketersediaan Tenaga Kerja Potensial yang Produktif.
8. Adanya Dekopinda, Dekranasda, Asosiasi UMKM dan Kelompok-Kelompok Usaha Bersama sebagai wadah penyalur aspirasi.
9. Adanya dana perkuatan modal untuk Koperasi, Industri dan UMKM.
10. Tersedianya informasi ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna.
11. Adanya Pasar dan Galery / Gedung Promosi sebagai tempat untuk memasarkan Produk – Produk Unggulan Kota Pariaman.

### **B. Kelemahan (*Weakness*)**

1. Pola pikir masyarakat dalam pengembangan ekonomi yang berorientasi pasar masih kurang mendukung proses industrialisasi terutama pada masyarakat pedesaan.
2. Akses masyarakat / UMKM ke sumber permodalan, teknologi, bahan baku, dan pasar masih rendah.
3. Skala usaha UMKM masih belum kompetitif.
4. Belum tersedianya sarana dan prasarana perdagangan yang representatif.
5. Masih lemahnya sistem manajemen pada UMKM dan koperasi.
6. Masih rendahnya SDM Pengusaha / Pengrajin dan Pengurus Koperasi.

7. Kondisi masyarakat yang masih dilatar belakangi oleh budaya agraris belum sepenuhnya mendukung pemasyarakatan teknologi industri yang lebih maju.
8. Keterbatasan pelaku usaha dan masyarakat tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
9. Belum terjalinnya kemitraan yang baik antar UMKM maupun dengan perusahaan besar.
10. Terbatasnya aparatur pemerintahan / pembina yang terampil di bidangnya masing-masing.
11. Belum tersedianya tenaga fungsional / penyuluh.

**C. Peluang (*Opportunities*)**

1. Kunjungan wisatawan ke objek Pariwisata Pantai Pariaman semakin meningkat terutama dengan adanya kereta api wisata, Penangkaran Penyu dan Wisata Pulau
2. “Pesta Budaya Tabuik” sebagai agenda tahunan Kota Pariaman.
3. Kecenderungan masyarakat untuk berwisata kuliner.
4. Adanya perhatian perantau yang tinggi terhadap kemajuan kota Pariaman.
5. Kecenderungan masyarakat untuk mengkonsumsi produk yang legal dan higienis.
6. Tersedianya pihak ketiga (perbankan) yang bersedia menjalin kemitraan dengan UMKM dan koperasi.
7. Terbukanya Akses Jaringan Internet untuk promosi UMKM.
8. Otonomi daerah memberi peluang untuk mengembangkan ekonomi daerah sesuai dengan kemampuan yang ada.

**D. Ancaman (*Threats*)**

1. Kemajuan daerah sekitar seperti Padang, Kab. Padang Pariaman Bukittinggi, dll.
2. Hasil Industri dan Kerajinan Kota Pariaman belum menjadi tuan di negeri sendiri, namun orang cukup dengan mencarinya di Bukittinggi.
3. Masuknya produk-produk UMKM dari luar Kota Pariaman.

4. Persaingan tidak sehat antara Koperasi dengan Lembaga Keuangan lainnya yang tidak resmi.
5. Adanya persaingan global.
6. Kebutuhan dana investasi semakin meningkat, sedangkan sumber daya terbatas.

### **Analisis SWOT**

Hasil Analisis SWOT dapat dilihat pada Matrik Analisis SWOT berikut :

<b>ALI</b>	<b>KEKUATAN</b>	<b>KELEMAHAN</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya komitmen Pimpinan dalam meningkatkan perekonomian rakyat.</li> <li>2. Letak geografis Kota Pariaman sebagai jalur pelintasan.</li> <li>3. Dekat dengan Bandara Internasional Minangkabau (BIM)</li> <li>4. Topografi daerah yang mendukung untuk bahan baku industri dan produk olahan.</li> <li>5. Adanya keterampilan khusus dan merupakan keahlian pengrajin yang sudah turun temurun.</li> <li>6. Adanya Sentra-Sentra Industri di Kota Pariaman</li> <li>7. Ketersediaan tenaga kerja potensial yang produktif.</li> <li>8. Adanya Dekopinda , Dekranasda, Asosiasi UMKM dan Kelompok Usaha Bersama</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pola pikir masyarakat dalam pengembangan ekonomi yang berorientasi pasar masih kurang mendukung proses industrialisasi terutama pada masyarakat pedesaan.</li> <li>2. Akses masyarakat/UMKM ke sumber permodalan, teknologi, bahan baku, dan pasar masih rendah</li> <li>3. Skala usaha UMKM masih belum kompetitif</li> <li>4. Belum tersedianya sarana dan prasarana perdagangan yang representatif</li> <li>5. Masih lemahnya sistem manajemen pada UMKM dan koperasi.</li> <li>6. Masih rendahnya SDM Pengrajin dan Pengurus Koperasi.</li> <li>7. Kondisi masyarakat yang masih dilatarbelakangi oleh budaya agraris belum sepenuhnya mendukung pemsyarakatan</li> </ol>

	<p>sebagai Wadah Penyalur Aspirasi Masyarakat.</p> <p>9. Adanya dana perkuatan modal untuk koperasi, Industri dan UMKM.</p> <p>10. Tersedianya informasi ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna.</p> <p>11. Adanya Pasar dan Gallery/Gedung Promosi sebagai tempat untuk memasarkan produk-produk Unggulan Kota Pariaman.</p>	<p>teknologi industri yang lebih maju.</p> <p>8. Keterbatasan pengetahuan pelaku usaha dan masyarakat tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen.</p> <p>9. Belum terjalinnya kemitraan yang baik antar UMKM maupun dengan perusahaan besar.</p> <p>10. Terbatasnya aparat pemerintah/Pembina yang terampil di bidangnya.</p> <p>11. Belum tersedianya tenaga fungsional/penyuluh.</p>
<p style="text-align: right;"><b>ALE</b></p> <p><b>PELUANG</b></p> <p>1. Kunjungan wisatawan ke objek pariwisata Pantai Pariaman semakin meningkat terutama dengan adanya kereta api wisata, Penangkaran Penyu, dan Wisata Pulau.</p>	<p><b>Kekuatan+Peluang</b></p> <p>1. Meningkatkan koordinasi serta sinergitas yang baik antar berbagai stakeholder dalam penciptaan iklim usaha yang kondusif untuk berusaha.</p> <p>2. Meningkatkan sinergitas konsep wisata dengan industri kreatif untuk memperkuat perekonomian daerah</p>	<p><b>Kelemahan+Peluang</b></p> <p>1. Mempersiapkan masyarakat untuk merespon perkembangan peluang usaha.</p> <p>2. Memfasilitasi pelaku usaha ke sumber permodalan, teknologi, bahan baku, dan pasar.</p> <p>3. Memfasilitasi sarana dan prasarana perdagangan untuk PKL</p>

<p>2. Pesta Budaya Tabuik sebagai agenda tahunan Kota Pariaman.</p> <p>3. Kecenderungan masyarakat untuk berwisata kuliner.</p> <p>4. Adanya perhatian perantau yang tinggi terhadap kemajuan Kota Pariaman.</p> <p>5. Kecenderungan masyarakat untuk mengkonsumsi produk yang legal dan higienis.</p> <p>6. Tersedianya pihak ketiga (perbankan) yang bersedia menjalin kemitraan dengan UMKM dan koperasi.</p> <p>7. Otonomi daerah memberi peluang untuk mengembangkan ekonomi daerah sesuai dengan kemampuan yang ada</p>	<p>3. Mengembangkan industri berbasis potensi lokal</p> <p>4. Pemanfaatan sarana pelayanan dalam menjaga dan meningkatkan kualitas produk (penerapan SNI).</p> <p>5. Pendaftaran Merk (HKI) produk makanan ringan dan kerajinan masyarakat Kota Pariaman</p> <p>6. Meningkatkan jumlah koperasi yang RAT tepat waktu</p> <p>7. Merevitalisasi Koperasi-Koperasi yang kurang aktif</p>	<p>4. Pembentukan koperasi komoditi unggulan</p> <p>5. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana untuk kelancaran tugas</p>
---	---	---

<b>ANCAMAN</b>	<b>Kekuatan+Ancaman</b>	<b>Kelemahan+Ancaman</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemajuan daerah sekitar seperti Padang, Kab. Padang Pariaman, Bukittinggi, dll.</li> <li>2. Hasil industri dan kerajinan Kota Pariaman belum menjadi tuan di negeri sendiri, namun orang cukup mencarinya di Bukittinggi.</li> <li>3. Masuknya produk-produk UMKM dari luar Kota Pariaman.</li> <li>4. Persaingan tidak sehat antara Koperasi dengan Lembaga Keuangan lainnya yang tidak resmi.</li> <li>5. Adanya Persaingan Global.</li> <li>6. Kebutuhan dana investasi semakin meningkat, sedangkan sumber daya terbatas.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menciptakan ikon-ikon spesifik Kota Pariaman yang tidak dimiliki oleh daerah lain</li> <li>2. Membangun sarana penunjang pariwisata.</li> <li>3. Meningkatkan pelayanan terhadap konsumen.</li> <li>4. Menekan biaya produksi.</li> <li>5. Meningkatkan promosi produk.</li> <li>6. Pengembangan usaha koperasi.</li> <li>7. Memperkuat industri komoditi unggulan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperkuat komitmen pemerintah bagi pengembangan UMKM.</li> <li>2. Mengoptimalkan kerjasama dengan daerah lain.</li> <li>3. Meningkatkan kemitraan UMKM dengan usaha besar.</li> <li>4. Peningkatan Kelembagaan Koperasi melalui Pembinaan Kelembagaan.</li> <li>5. Meningkatkan Koordinasi.</li> <li>6. Peningkatan Kelembagaan.</li> </ol>

## **BAB III**

# **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perindagkop dan UKM**

Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman, sebagai Dinas Teknis dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM mengalami permasalahan-permasalahan antara lain :

1. Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung proses pembinaan dan pelayanan sehingga sumber data masih minim.
2. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utama-nya.
3. Rendahnya SDM pengurus dan pengawas koperasi, dalam hal manajemen keuangan dan pemasaran dan menjadi pengurus koperasi bukan sebagai pekerjaan utama, sehingga koperasi tidak bisa berkembang secara maksimal.
4. Rendahnya partisipasi anggota terhadap koperasi dan terbatasnya modal koperasi.
5. Belum optimalnya jaringan kerjasama antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dalam rangka peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM.
6. Dalam pembinaan IKM, ada sebagian pengrajin tidak mau merubah kebiasaan yang selama ini dilakukan sehingga sulit menerima inovasi.
7. Belum tersedianya sarana dan prasarana perdagangan yang representatif.
8. Tingginya persaingan lembaga keuangan yang ada (LKM yang tidak berbadan Hukum)

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi Kota Pariaman Tahun 2018 – 2023 adalah ”**Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa Yang Religius Dan Berbudaya**” yang kemudian dituangkan dalam misi. Adapun Misi Kota Pariaman adalah :

1. Mewujudkan Pengelolaan Wisata Kota Yang Maju, Religius, Tertib dan Berbudaya.
2. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berbudaya dan Berkualitas.
3. Mewujudkan Pemerintahan Yang Handal dan Prima Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.
4. Mewujudkan Kota Pesisir Modern, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan Hidup.
5. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan (Kreatif) Yang Berbasis Lokal dan Budaya Masyarakat

Berdasarkan Misi Kota Pariaman tersebut diatas, yang berkaitan dengan Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman adalah Penguatan Struktur Perekonomian melalui Ekonomi Kerakyatan (Kreatif) Yang Berbasis Lokal dan Budaya Masyarakat.

Untuk Mencapai Sasaran RPJMD yang berkaitan dengan Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman, adapun strategi yang dilakukan :

1. Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan melalui pemberdayaan koperasi
2. Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
3. Peningkatan Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen
4. Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Industri

Arah kebijakan :

1. Pengembangan kawasan sentra-sentra produksi / industri Kota Pariaman yang mendukung ekonomi kreatif.
2. Meningkatkan SDM Pengurus dan anggota koperasi, UMKM, Usaha Ekonomi Kreatif.
3. Peningkatan Kapasitas Lembaga Keuangan non Bank.
4. Pembangunan Pasar Tradisional yang bersih, aman dan nyaman.
5. Perlindungan Konsumen.

### **3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kab/Kota**

Pada dasarnya, penetapan Rencana Strategis Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman merupakan bentuk pengembangan dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dikaitkan dengan Renstra Kementerian/Lembaga, Dinas Perindagkop dan UKM mengacu pada Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan.

#### **▪ Kementerian Koperasi dan UKM**

Visi Kementerian Koperasi dan UKM : Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang Sehat, Kuat, Tangguh dan Mandiri untuk Berkontribusi Dalam Perekonomian Nasional.

Untuk mencapai visi di atas berikut dijabarkan misi Kementerian Koperasi dan UKM :

- a. Meningkatkan akses Pembiayaan Formal bagi Koperasi dan UMKM.
- b. Meningkatkan akses dan sumber pembiayaan yang lebih luas, mudah dan terjangkau bagi koperasi dan UMKM.
- c. Menyiapkan bahan kebijakan yang kondusif bagi perkembangan Koperasi dan UMKM.
- d. Memantapkan koordinasi dengan para lintas pelaku dalam rangka meningkatkan sinergi pembinaan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
- e. Memantapkan pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi di bidang pembiayaan.
- f. Menyebarkan berbagai informasi pembiayaan seluas-luasnya kepada para pelaku koperasi dan UMKM.

Tujuan Kementerian Koperasi dan UKM :

1. Peningkatan jumlah dan peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian Nasional melalui :
  - a. Meningkatkan jumlah Koperasi yang sehat, kuat dan dipercaya.

- b. Meningkatkan peran dan kontribusi Koperasi dan UMKM dalam perekonomian Nasional.
2. Peningkatan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM melalui:
  - a. Mengembangkan kebijakan dan program-program pemberdayaan Koperasi dan UMKM berdasarkan hasil kajian.
  - b. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan keterampilan 5DM Koperasi dan UMKM.
3. Peningkatan Daya Saing Produk Koperasi dan UKM melalui Meningkatkan kemampuan Koperasi dan UKM dalam mengembangkan produk-produk kreatif, inovatif, berkualitas dan berdaya saing.
4. Peningkatan Pemasaran Produk Koperasi dan UKM melalui Meningkatkan kelembagaan dan jaringan pemasaran serta pangsa pasar produk Koperasi dan UKM.
5. Meningkatkan Akses Pembiayaan dan Penjaminan Koperasi dan UMKM melalui Penyediaan skema dan memperluas akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan Koperasi dan UMKM.
6. Pengembangan Wirausaha Koperasi dan UMKM baru melalui
  - a. Menumbuhkan wirausaha baru yang inovatif.
  - b. Meningkatkan kesadaran berwirausaha sebagai budaya dan mengembangkan kewirausahaan dikalangan masyarakat.
7. Perbaiki Iklim Usaha yang lebih Berpihak kepada Koperasi dan UMKM melalui:
  - a. Meningkatkan kualitas Layanan publik yang transparan, akuntabel dan kredibel.
  - b. Menyediakan peraturan perundang-undangan yang Lebih berpihak pada Koperasi dan UKM

▪ **Kementerian Perindustrian :**

Visi Pembangunan Industri Nasional Jangka Panjang (2025) adalah **Membawa Indonesia pada tahun 2025 untuk menjadi Negara Industri Tangguh Dunia**. Visi Kementerian Perindustrian : **Pemantapan daya saing**

**basis industri manufaktur yang berkelanjutan serta terbangunnya pilar industri andalan masa depan.**

Sesuai dengan Visi di atas, misi tersebut dijabarkan dalam misi lima tahun sebagai berikut:

1. Mendorong peningkatan nilai tambah industri;
2. Mendorong peningkatan penguasaan pasar domestik dan internasional;
3. Mendorong peningkatan industri jasa pendukung;
4. Memfasilitasi penguasaan teknologi industri;
5. Memfasilitasi penguatan struktur industri;
6. Mendorong penyebaran pembangunan industri ke luar pulau Jawa;
7. Mendorong peningkatan peran IKM terhadap PDB.

▪ **Kementerian Perdagangan :**

Visi : **Perdagangan Sebagai Sektor Penggerak Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi serta Pencipta Kemakmuran Rakyat Yang Berkeadilan**”, dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, misi Kementerian Perdagangan adalah:

1. Meningkatkan kinerja ekspor nonmigas secara berkualitas.
2. Memperkuat pasar dalam negeri.
3. Menjaga ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi nasional.

Sebagai penjabaran dari visi dan misi Kementerian Perdagangan, tujuan pembangunan perdagangan yang ingin dicapai yaitu:

1. **Peningkatan akses pasar ekspor dan fasilitasi perdagangan luar negeri** untuk mengurangi ketergantungan pasar tujuan ekspor ke negara-negara tertentu dan meningkatkan kelancaran arus barang ekspor dan impor.
2. **Perbaikan iklim usaha perdagangan luar negeri** yang berorientasi pada pelayanan publik yang optimal.
3. **Peningkatan daya saing ekspor** melalui peningkatan kualitas produk ekspor dan peningkatan citra produk ekspor Indonesia di pasar global.

4. **Peningkatan peran dan kemampuan diplomasi perdagangan internasional** untuk memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia dalam forum multilateral, regional, bilateral yang penuh tantangan dan kompleksitas.
5. **Perbaikan iklim usaha perdagangan dalam negeri** dengan melakukan reformasi birokrasi dan harmonisasi kebijakan perdagangan dalam negeri di pusat dan di daerah.
6. **Peningkatan kinerja sektor perdagangan dan ekonomi kreatif** melalui fasilitasi promosi dan penciptaan kebijakan perdagangan yang sesuai.
7. **Peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan pasar dalam negeri** sehingga masyarakat terhindar dari produk-produk yang menyebabkan kerugian, membahayakan kesehatan, keamanan dan keselamatan konsumen serta produsen dalam negeri terhindar dari praktek perdagangan tidak sehat.
8. **Stabilisasi dan penurunan disparitas harga bahan pokok** di Indonesia, sehingga daya beli masyarakat terhadap bahan pokok dapat terjaga.
9. **Penciptaan jaringan distribusi yang efisien** melalui penciptaan sarana dan kebijakan distribusi serta layanan logistik yang mendukung dan sinergis.

Untuk Provinsi, Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman mengacu kepada pada Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Sumbar dan Dinas Perindag Prov. Sumbar.

▪ **Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Sumatera Barat :**

**Visi : Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang tangguh, berdaya saing tinggi, berorientasi pasar dan berbasis sumber daya lokal “.**

Misi :

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berkoperasi
- b. Mengembangkan iklim usaha yang kondusif dan mendorong peningkatan daya saing produk-produk UMKM.

Untuk mencapai Visi dan Misi, dirumuskan tujuan :

1. Peningkatan peranan koperasi dalam perekonomian daerah terutama dalam pengembangan sektor riil.
2. Peningkatan peran UMKM dalam penciptaan lapangan kerja dan pendapatan pelaku usahanya.
3. Peningkatan peranan koperasi dalam menghimpun dan menyediakan dana bagi UMK.
4. Peningkatan kualitas koperasi.

▪ **Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat :**

Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat adalah :

**“Mewujudkan Industri yang tangguh dan perdagangan yang efisien sebagai penggerak perekonomian daerah “.**

Misi :

- a. Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk serta usaha industri yang berwawasan lingkungan.
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya daerah untuk pengembangan industri unggulan.
- c. Meningkatkan peranan perdagangan dalam negeri dan perlindungan terhadap konsumen.
- d. Meningkatkan dan mengembangkan ekspor daerah

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Perindag Provinsi Sumatera Barat :

1. Peningkatan populasi usaha industri dan peranan sektor industri dalam perekonomian daerah.
2. Memperkuat struktur industri.
3. Pengembangan kawasan industri, sentra industri dan usaha industri yang berwawasan lingkungan dan menguasai teknologi.
4. Menjaga ketersediaan kebutuhan bahan pokok dan stabilisasi harga.
5. Peningkatan kesadaran pelaku usaha dan masyarakat terhadap perlindungan konsumen.
6. Peningkatan volume dan nilai ekspor non migas daerah.

Strategi yang dilakukan:

1. Strategi Sektor Industri
  - a. Meningkatkan kualitas produk, efisiensi dan produktivitas.
  - b. Meningkatkan sentra industri kecil sebagai tujuan wisata.
  - c. Memperkuat kelembagaan industri.
  - d. Mengembangkan industri berbasis sumber daya lokal.
  - e. Peningkatan SDM Pelaku IKM dan Aparat Pembina
2. Strategi Sektor Perdagangan
  - a. Meningkatkan koordinasi untuk kelancaran distribusi barang.
  - b. Peningkatan pembinaan dan pengawasan di sektor perdagangan.
  - c. Peningkatan tertib ukur di segala bidang.
  - d. Meningkatkan akses pasar melalui kegiatan-kegiatan pengembangan di sektor perdagangan.
  - e. Meningkatkan promosi produk lokal.
  - f. Meningkatkan penerapan SNI terhadap produk ekspor.

Kebijakan dari Dinas Perindag Prov. Sumbar :

1. Kebijakan Sektor Industri
  - a. Mengembangkan industri unggulan provinsi dan kompetensi inti industri kabupaten/kota.
  - b. Revitalisasi Sentra industri.
  - c. Mengarahkan semua bentuk fasilitasi pengembangan pada upaya memperkuat struktur industri, meningkatkan dan memperluas pemanfaatan teknologi.
2. Kebijakan Sektor Perdagangan
  - a. Peningkatan penataan sistem distribusi yang menjamin kelancaran arus barang dan jasa.
  - b. Peningkatan efektivitas pengawasan perlindungan konsumen.
  - c. Peningkatan daya saing produk domestik.
  - d. Peningkatkan daya saing ekspor produk non migas untuk mendorong peningkatan diversifikasi produk dan pasar tujuan ekspor.
  - e. Peningkatan kesadaran penerapan SNI.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.**

Penataan ruang kota pada dasarnya ditujukan sebagai upaya untuk :

- a. Mewujudkan optimasi dan sinergi pemanfaatan ruang wilayah secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan nasional.
- b. Menciptakan keserasian dan keseimbangan antar wilayah, antar kawasan dan antar sektor pembangunan.
- c. Menciptakan keterpaduan program-program pembangunan wilayah
- d. Mendorong minat investasi masyarakat dan dunia usaha di wilayah Kota Pariaman.

Pemanfaatan Ruang di Kota Pariaman :

1. Kawasan Pemukiman
2. Kawasan Perdagangan dan Jasa
3. Kawasan Pariwisata
4. Kawasan Perkantoran
5. Kawasan Terbuka Non Hijau
6. Kawasan Industri
7. Kawasan Lindung

#### **▪ Kawasan Perdagangan dan Jasa :**

Tujuan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa berdasarkan berdasarkan rencana pola ruang kawasan budidaya adalah:

- a. menyediakan lahan untuk menampung tenaga kerja, dalam wadah berupa perkantoran swasta, pertokoan, jasa, rekreasi dan pelayanan masyarakat;
- b. menyediakan ruang yang cukup bagi penempatan kelengkapan dasar fisik berupa sarana-sarana penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya dapat berfungsi sebagaimana mestinya;

- c. menyediakan ruang yang cukup bagi sarana-sarana umum, terutama untuk melayani kegiatan-kegiatan produksi dan distribusi, yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah

Kawasan jasa dan perdagangan ini berada di sepanjang jalan utama Kota Pariaman dan masih berada di Kecamatan Pariaman Tengah tepatnya daerah Kampung Jawa, Kampung Perak, Kampung Pondok dan Kampung Keling. Kawasan Jasa dan Perdagangan ini berisi:

- Pusat Jasa dan perdagangan lokal  
Terletak di sepanjang jaringan jalan kabupaten yang masuk dalam kota, dibatasi oleh kompleks pemerintahan dan taman kota sebagai *buffer*.  
Bentuk perdagangan dan jasa di kawasan ini berupa pertokoan dan perkantoran swasta, termasuk perkantoran perbankan. Kawasan ini sangat strategis untuk diakses, baik oleh masyarakat kota, maupun masyarakat dari luar kota, karena dilengkapi akses jalan regional (arteri primer) dan jalan arteri sekunder (jalan kota).
- Pusat perbelanjaan  
Untuk kedepannya Kota Pariaman diperkirakan akan semakin tinggi laju perkembangan perekonomian kota. Akan dibutuhkan sarana pusat perbelanjaan sebagai bentuk pelayanan ekonomi sekaligus wisata bagi masyarakatnya. Pusat perbelanjaan akan berlokasi di kawasan perdagangan dan jasa regional di Kawasan Jati, merupakan perbatasan antara kawasan pemerintahan dengan jasa perdagangan. Bentuk pusat perbelanjaan dapat berupa pasar swalayan besar ataupun *department-department store*.  
Dampak adanya kegiatan perdagangan ini biasanya berupa munculnya *informal sector* (pedagang kaki lima, PKL). Pengaturan PKL harus dipertimbangkan dengan baik, karena menyangkut beberapa hal, terutama masalah sosial. Pengaturan PKL dapat dilakukan dengan cara, seperti:
  - Penetapan peraturan perparkiran pada setiap bangunan di sepanjang jalan utama, misalnya memberikan zona larangan parkir *on-street* pada ruas jalan.
  - Memberikan lahan kosong untuk pengalokasian PKL.

Kawasan sub pusat kota ini merupakan kawasan ekonomi yang dapat melayani masyarakat Kota Pariaman secara keseluruhan, dimana kawasan ini akan berfungsi sebagai pusat-pusat lingkungan pada setiap kecamatan. Dengan berkembangnya Kota Pariaman sebagai kota otonom nantinya akan meningkatkan intensitas perdagangan di Kota Pariaman sehingga mendorong tumbuhnya kegiatan-kegiatan turunannya, seperti pasar, jasa pengangkutan, retail, dan lain-lain. Beraneka ragamnya kegiatan ekonomi ini memberikan pengaruh terhadap ruang kota secara keseluruhan, terutama menyangkut implikasinya terhadap alokasi ruang. Berdasarkan hal tersebut maka kawasan ini secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan pada sub pusat kota tepatnya kegiatan ekonomi.

Kawasan perdagangan dan jasa terdiri dari :

- a. Pasar tradisional berada di Cubadak Air Kecamatan Pariaman Utara, Kurai Taji Kecamatan Pariaman Selatan dan Cubadak Mentawai Kecamatan Pariaman Timur
- b. Pasar perbelanjaan dan toko modern berada di Jati, Kecamatan Pariaman Tengah.

#### ▪ **Kawasan Industri**

Tujuan pengembangan kawasan industri berdasarkan berdasarkan rencana pola ruang kawasan budidaya adalah :

- a. Meningkatkan efisiensi produksi dan daya saing industri; dan
- b. Menyediakan ruang bagi pengembangan sektor ekonomi melalui lapangan usaha industri pengolahan dan industri pergudangan

Kegiatan industri di Kota Pariaman diperkirakan termasuk ke dalam kategori *light industries*, yaitu industri dengan tingkat polusi yang relatif rendah. Jenis industri yang akan ada meliputi industri pengolahan hasil pertanian (industri kecil-menengah) dan industri kerajinan “Sulaman Tangan dan Bordir” berupa industri kecil dimana lokasinya menyebar di kawasan perumahan.

Sedangkan untuk kawasan industri ini akan dialokasikan di luar kota dengan pertimbangan hubungan fungsional dengan kegiatan lainnya. Walaupun *low polution*, sebuah industri hendaknya jauh dari aktivitas perkotaan lainnya,

terutama dengan perumahan. Dengan demikian, maka kegiatan industri di Kota Pariaman dialokasikan di luar kota. Industri Kerajinan tangan tersebut dialokasikan ke arah jalan luar kota (arah utara Pariaman). Hal ini dengan mempertimbangkan pula lokasi pengembangan “*Home Industry*” yang diarahkan di Kecamatan Pariaman Utara tepatnya Kawasan Naras yang ditetapkan sebagai kawasan Sentra Bordir.

### **Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Merupakan proses sistematis untuk mengevaluasi pengaruh lingkungan hidup dari, dan menjamin diintegrasikannya prinsip-prinsip keberlanjutan dalam, pengambilan, keputusan yang bersifat strategis”. Secara umum, KLHS berfungsi untuk menelaah efek dan/atau dampak lingkungan, sekaligus mendorong pemenuhan tujuan keberlanjutan pembangunan dan pengelolaan sumberdaya dari suatu kebijakan, rencana atau program pembangunan.

### **Isu Strategis Lingkungan Hidup Kota Pariaman :**

Kota Pariaman Rawan Bencana; Litologi dan Struktur Geologi yang tersebar di wilayah Kota Pariaman merupakan media yang sangat berperan dalam menentukan intensitas bencana di wilayah ini. Kemampuan masing-masing litologi dalam meneruskan gelombang gempa berbeda satu dengan yang lainnya. Endapan yang bersifat lepas (*unconsolidated*) merupakan litologi yang mudah meneruskan gelombang gempa. Lokasi-lokasi dimana terdapat struktur geologi, terutama patahan dan kekar-kekar merupakan daerah yang lebih rentan terhadap terjadinya gempa.

Berdasarkan hasil kajian dan analisis terhadap kondisi dan karakteristik geologi, tanah dan batuan serta pengamatan di beberapa lokasi di wilayah Kota Pariaman, diperoleh karakteristik kebencanaan Kota Pariaman yang dapat dijadikan sebagai salah-satu pertimbangan dalam penataan ruang wilayah kota dimasa mendatang. Rincian dari kebencanaan di Kota Pariaman adalah sebagai berikut :

1. Bencana Gempa Bumi
2. Bencana Tsunami

Tsunami adalah rangkaian gelombang yang mampu menjalar dengan kecepatan hingga lebih dari 900 km per jam, terutama disebabkan oleh gempa bumi yang terjadi di dasar laut

### 3. Bencana Gerakan Tanah

Zona Kerentanan Gerakan Tanah ditentukan berdasarkan faktor penyebab kejadian, yakni: geologi, morfologi, curah hujan, tata guna lahan dan kegempaan. Geologi meliputi kondisi sifat fisik dan keteknikan batuan, tanah pelapukan, dan kedudukan batuan serta struktur geologi; morfologi meliputi kemiringan lereng medan; curah hujan meliputi intensitas dan lama hujan; tata lahan meliputi pengolahan lahan dan vegetasi penutup; dan kegempaan meliputi intensitas gempa. Berdasarkan faktor tersebut, daerah penyelidikan dibagi menjadi 4 (empat) zona, yaitu : Zona Kerentanan Gerakan Tanah Sangat Rendah, Zona Kerentanan Gerakan Tanah Rendah, Zona Kerentanan Gerakan Tanah Menengah dan Zona Kerentanan Gerakan Tanah Tinggi

### 4. Likuifaksi

Likuifaksi terjadi apabila lapisan tanah yang berupa pasir berbutir halus (0,075 ->0,50 mm), relatif seragam, bersifat lepas dan dalam keadaan jenuh air (muka air tanahnya dangkal) mendapat goncangan hebat akibat gempa bumi dengan percepatan gempa tertentu, maka tegangan airpori akan meningkat dan mengakibatkan lapisan tanah pasir tersebut akan cenderung membubur dan menyebabkan nilai daya dukung tanah menjadi berkurang atau bahkan menjadi nol.

### 5. Bencana Banjir

Erosi sungai dan air permukaan dapat terjadi karena pengikisan tebing sungai oleh arus air sungai atau air permukaan, sedangkan aliran banjir bandang terjadi setelah atau selama hujan akibat akumulasi dan pembendungan alur oleh endapan lahar atau material gerakan tanah pada alur sungai di bagian hulu dan dipicu oleh erosi yang kuat dan curah hujan yang tinggi. Erosi ini dapat terjadi pada longsor serta terbukanya tanaman penutup terutama pada tanah/batuan pasir yang bersifat lepas. Berdasarkan kerawanan terhadap kebencanaan, maka dapat diperoleh

wilayah rawan bencana di Kota Pariaman. Diketahui luas wilayah yang rawan bencana tinggi sebesar 31,84 km<sup>2</sup> (43,4%) dari luas wilayah.

### **3.5. Penentuan Isu –Isu Strategis Dinas**

Dari analisa kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dapat dimunculkan beberapa strategi kekuatan + peluang, strategi kelemahan + peluang, strategi kekuatan + ancaman dan strategi kelemahan+ancaman, yaitu :

#### **a. Kekuatan+Peluang (SO)**

1. Meningkatkan koordinasi serta sinergitas yang baik antar berbagai stakeholder dalam penciptaan iklim usaha yang kondusif untuk berusaha.
2. Meningkatkan sinergitas konsep wisata dengan industri kreatif untuk memperkuat perekonomian daerah.
3. Mengembangkan industri berbasis potensi lokal
4. Pemanfaatan sarana pelayanan dalam menjaga dan meningkatkan kualitas produk (penerapan SNI).
5. Pendaftaran Merk (HKI) produk makanan ringan dan kerajinan masyarakat Kota Pariaman
6. Meningkatkan jumlah koperasi yang RAT tepat waktu.
7. Merevitalisasi koperasi-koperasi yang kurang aktif.

#### **b. Kelemahan+Peluang (WO)**

1. Mempersiapkan masyarakat untuk merespon perkembangan peluang usaha
2. Memfasilitasi pelaku usaha ke sumber permodalan, teknologi, bahan baku, dan pasar.
3. Memfasilitasi sarana dan prasarana perdagangan untuk PKL
4. Pembentukan koperasi komoditi unggulan
5. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana untuk kelancaran tugas.

#### **c. Kekuatan+Ancaman (ST)**

1. Menciptakan ikon-ikon spesifik Kota Pariaman yang tidak dimiliki oleh daerah lain.
2. Membangun sarana penunjang pariwisata.
3. Meningkatkan pelayanan terhadap konsumen.

4. Menekan biaya produksi.
  5. Meningkatkan promosi produk.
  6. Pengembangan usaha koperasi.
  7. Memperkuat industri komoditi unggulan.
- d. Kelemahan+Ancaman (WT)
1. Memperkuat komitmen pemerintah bagi pengembangan UMKM.
  2. Mengoptimalkan kerjasama dengan daerah lain.
  3. Meningkatkan kemitraan UMKM dengan usaha besar.
  4. Peningkatan Kelembagaan Koperasi melalui Pembinaan Kelembagaan.
  5. Meningkatkan koordinasi.

Dari strategi yang dimunculkan dalam matriks analisis SWOT, dan dari telaahan pada sub bab sebelumnya diseleksi beberapa isu strategis yang menjadi prioritas, yaitu:

1. Pemanfaatan Pantai dan Pasar untuk meningkatkan perekonomian rakyat.
2. Penguatan Perkonomian Daerah melalui Pengembangan Industri Kreatif.
3. Peningkatan Kelembagaan Koperasi melalui Pembinaan Kelembagaan.
4. Pemberdayaan Aparatur dan Pelaku Usaha serta penumbuhan Wirausaha baru.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perindagkop dan UKM**

Dalam upaya mendukung pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018-2023, maka tujuan jangka menengah Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Peran Koperasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi
2. Meningkatnya Kontribusi UMKM terhadap Sektor Ekonomi
3. Meningkatnya Usaha di Sektor Perdagangan
4. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi di Sektor Industri

#### **Sasaran Jangka Menengah Perindagkop dan UKM**

Berdasarkan hasil analisis melalui pendekatan *logical framework*, maka sasaran yang ingin dicapai Dinas Perindagkop dan UKM Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Produktivitas Koperasi
2. Meningkatnya Pertumbuhan UMKM
3. Meningkatnya Pendapatan UMKM
4. Meningkatnya Sarana Perdagangan yang Representatif
5. Meningkatnya Pendapatan Usaha Perdagangan
6. Peningkatan Perlindungan Konsumen
7. Meningkatnya Pertumbuhan Industri Berbasis Lokal
8. Meningkatnya                    Nilai                    Tambah                    Industri

**Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

**Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman 2018-2023**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Awal (2018)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-							
						2019	2020	2021	2022	2023			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	1.	Meningkatnya Peran Koperasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Jumlah Koperasi yang Sehat	1.	Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi yang sehat	1.	Persentase laju Pertumbuhan Koperasi sehat	7 Koperasi	2 %	3 %	4 %	5 %	6 %
2.	1.	Meningkatnya Kontribusi UMKM terhadap Sektor Ekonomis	Jumlah UMKM yang Tangguh dan Mandiri	1.	Meningkatnya Pertumbuhan UMKM	1.	Persentase laju Pertumbuhan UMKM	2,40	2,40	2,41	2,43	2,45	2,46
3.	1.	Meningkatnya peran sektor perdagangan dalam	Kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB	1.	Meningkatnya laju pertumbuhan sektor	1.	Persentase laju pertumbuhan sektor perdagangan	2,00	2,00	2,01	2,013	2,15	2,18

		perekonomian			perdagangan								
4.	1.	Meningkatnya peran sektor perindustrian dalam perekonomian	Kontribusi sektor perindustrian dalam PDRB	1.	Meningkatnya laju pertumbuhan sektor industri	1.	Persentase laju pertumbuhan sektor industri	1,15	1,15	1,16	1,17	1,18	1,19

## **Definisi Operasional**

Dalam menghitung kinerja sasaran strategis, indikator kinerja dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

### 1. Persentase Pertumbuhan Koperasi Sehat

$$\frac{\text{Jumlah Koperasi Sehat Tahun (n)} - \text{Jumlah Koperasi Sehat Tahun (n - 1)}}{\text{Jumlah Koperasi Sehat Tahun (n - 1)}} \times 100\%$$

Jumlah Koperasi Sehat diperoleh dari Data Koperasi Sehat

Koperasi Sehat adalah Koperasi aktif yang menjalankan usaha dalam 2 tahun terakhir dan memiliki kriteria baik sesuai dengan penilaian yang dilakukan yaitu RAT tepat waktu.

### 2. Persentase Pertumbuhan UMKM

$$\frac{\text{Jumlah UMKM Tahun (n)} - \text{Jumlah UMKM Tahun (n - 1)}}{\text{Jumlah UMKM Tahun (n - 1)}} \times 100\%$$

Jumlah Usaha Kecil diperoleh dari Data Jumlah Usaha Kecil

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

### 3. Persentase laju pertumbuhan sektor perdagangan

$$\frac{\text{Jumlah Sektor Perdagangan Tahun (n)} - \text{Jumlah Sektor Perdagangan Tahun (n-1)}}{\text{Jumlah Sektor Perdagangan Tahun (n-1)}} \times 100\%$$

Persentase laju pertumbuhan sektor perdagangan dihitung dari Jumlah unit Usaha Perdagangan yang diperoleh dari Data Jumlah Unit Usaha Perdagangan.

Jumlah Unit Usaha Perdagangan adalah Jumlah seluruh pedagang (formal dan informal). Hal ini mencakup seluruh pedagang di wilayah Kota Pariaman

#### 4. Persentase laju pertumbuhan sektor perindustrian

$$\frac{\text{Jumlah Sektor Perindustrian Tahun (n)} - \text{Jumlah Sektor Perindustrian Tahun (n-1)}}{\text{Jumlah Sektor Perindustrian Tahun (n-1)}} \times 100\%$$

Persentase laju pertumbuhan sektor perindustrian dihitung dari Jumlah unit IKM, dimana jumlah Unit IKM diperoleh dari Data Jumlah IKM

Jumlah Unit IKM (Industri Kecil Menengah ) adalah Banyaknya satuan Usaha Industri yang berskala Kecil dan berskala Menengah. Dalam hal ini, IKM yang dimaksud adalah Industri Kecil Menengah yang ada di wilayah Kota Pariaman.

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perindagkop dan UKM**

Strategi yang akan ditempuh dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah dikemukakan diatas, maka strategi Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman adalah:

- 1) Penataan Kelembagaan Koperasi
- 2) Meningkatkan Kapasitas SDM Pengurus Koperasi
- 3) Pengembangan akses pelayanan dan sumber pendanaan koperasi
- 4) Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- 5) Pembinaan dan Pengembangan UMKM
- 6) Meningkatkan Akses UMKM Terhadap Permodalan
- 7) Penataan Pasar
- 8) Revitalisasi Pasar Tradisional
- 9) Membangun Kesepakatan dengan Pelaku Usaha di dalam dan Luar Negeri
- 10) Optimalisasi Kelembagaan Perlindungan Konsumen
- 11) Peningkatan Pengetahuan Masyarakat terhadap Hak-Hak Konsumen
- 12) Memfasilitasi Pengembangan Industri Kreatif
- 13) Mengembangkan Komoditi Industri Unggulan
- 14) Memfasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Industri

Namun demikian, strategi tersebut sangat bergantung pada perkembangan lingkungan strategis dalam periode lima tahun. Strategi lainnya menjadi sangat relevan untuk dipilih dan dijabarkan menjadi program dan kegiatan operasional bila lingkungan strategisnya memerlukan.

Untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman menetapkan arah kebijakan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagai berikut :

- 1) Pemberdayaan Kelompok Usaha di Masyarakat sebagai cikal bakal koperasi
- 2) Mendorong Tumbuhnya Koperasi Baru
- 3) Penerapan Manajemen Modern Koperasi
- 4) Peningkatan SDM Pengurus, Pengawas dan Pengelola Koperasi Melalui Pelatihan dan Penyuluhan

- 5) Fasilitasi Permodalan Koperasi
- 6) Pendampingan Usaha Produktif Koperasi
- 7) Pendampingan Usaha Produktif Koperas
- 8) Pemilihan Jenis Usaha Koperasi yang sesuai dengan minat dan Kemampuan
- 9) Pemantauan Pengelolaan Dana Pemerintah yang ada pada Koperasi
- 10) Mendorong Tumbuhnya UMKM Baru
- 11) Pengembangan UKM yang berkeunggulan kompetitif
- 12) Menciptakan Iklim Usaha yang sehat untuk Perkembangan UMKM
- 13) Pengembangan Teknologi Informasi
- 14) Memfasilitasi Permodalan UMKM
- 15) Meningkatkan Hubungan Kemitraan UMKM dengan BUMN/BUMD/Swasta
- 16) Promosi Perdagangan Kota Pariaman melalui Pameran, Website, media elektronik dan Cetak
- 17) Pembinaan Pedagang Kaki Lima
- 18) Mengoptimalkan Fungsi Pasar yang telah ada
- 19) Pengembangan Kawasan Pujasera untuk Pedagang Kaki Lima
- 20) Pembangunan Pasar Tradisional yang bersih, aman dan nyaman
- 21) Melaksanakan Kerjasama melalui Nota Kesepahaman dibidang Pemasaran dengan Pelaku Usaha baik dalam maupun Luar Negeri
- 22) Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kota Pariaman
- 23) Optimalisasi Pengawasan terhadap Peredaran Barang dan Jasa
- 24) Memberikan Sosialisasi Masyarakat tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen
- 25) Memfasilitasi Akses Modal, Bahan Baku, Disain, Teknologi dan Pemasaran usaha industri
- 26) Fasilitasi Pendidikan, Pelatihan, Magang dan Study Komparatif
- 27) Pembinaan dan Pendampingan Pelaku Usaha Industri Kreatif
- 28) Menyusun Dokumen Perencanaan Pengembangan Industri
- 29) Pengembangan Sentra dan Kawasan Industri Unggulan
- 30) Membangun Sarana dan Prasarana untuk pengembangan industri
- 31) Memfasilitasi Pengadaan Peralatan Industri.

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan OPD dalam lima tahun mendatang, sebagaimana Tabel 5.1 dibawah ini.

**Tabel 5. 1 Strategi dan Arah Kebijakan**

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>		<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>
1.	1.	Meningkatnya Peran Koperasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Produktivitas Koperasi	<p>Penataan Kelembagaan Koperasi</p> <p>Meningkatkan Kapasitas SDM Pengurus Koperasi</p> <p>Pengembangan akses pelayanan dan sumber pendanaan koperasi</p>	<p>Pemberdayaan Kelompok Usaha di Masyarakat sebagai cikal bakal koperasi</p> <p>Mendorong Tumbuhnya Koperasi Baru</p> <p>Penerapan Manajemen Modern Koperasi</p> <p>Peningkatan SDM Pengurus, Pengawas dan Pengelola Koperasi Melalui Pelatihan dan Penyuluhan</p> <p>Fasilitasi Permodalan Koperasi</p> <p>Pendampingan Usaha Produktif Koperasi</p> <p>Pemilihan Jenis Usaha Koperasi yang sesuai dengan minat dan kemampuan</p> <p>Pemantauan Pengelolaan Dana Pemerintah yang ada pada Koperasi</p>

2.		Meningkatnya Kontribusi UMKM terhadap Sektor Ekonomi	Meningkatnya Pertumbuhan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Mendorong Tumbuhnya UMKM Baru
				Pembinaan dan Pengembangan UMKM	Pengembangan UKM yang berkeunggulan kompetitif
					Menciptakan Iklim Usaha yang sehat untuk perkembangan UMKM
					Pengembangan Teknologi Informasi
					Memfasilitasi Permodalan UMKM
				Meningkatkan Akses UMKM Terhadap Permodalan	Meningkatkan Hubungan Kemitraan UMKM dengan BUMN/BUMD/Swasta
2.	1.	Meningkatnya Usaha di Sektor Perdagangan	Meningkatnya Sarana Perdagangan yang Representatif	Penataan Pasar	Promosi Perdagangan Kota Pariaman melalui Pameran, Website, media elektronik dan Cetak
				Revitalisasi Pasar Tradisional	Pembinaan Pedagang Kaki Lima
					Mengoptimalkan Fungsi Pasar yang telah ada
			Meningkatnya Pendapatan Usaha	Pengembangan Kawasan Pujasera untuk Pedagang Kaki Lima	
				Pembangunan Pasar Tradisional yang bersih, aman dan nyaman	

			Perdagangan	Membangun Kesepakatan dengan Pelaku Usaha di dalam dan Luar Negeri	Melaksanakan Kerjasama melalui Nota Kesepahaman dibidang Pemasaran dengan Pelaku Usaha baik dalam maupun Luar Negeri
			Peningkatan Perlindungan Konsumen	Optimalisasi Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Memberikan Sosialisasi tentang Kebijakan dan Prosedur Ekpor Impor.
				Peningkatan Pengetahuan Masyarakat terhadap Hak-Hak Konsumen	Fasilitasi Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pariaman
					Optimalisasi Pengawasan terhadap Peredaran Barang dan Jasa
					Memberikan Sosialisasi Masyarakat tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen
3.	1.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi di Sektor Industri	Meningkatnya Pertumbuhan Industri Berbasis Lokal	Memfasilitasi Pengembangan Industri Kreatif	Memfasilitasi Akses Modal, Bahan Baku, Disain, Teknologi dan Pemasaran
				Mengembangkan Komoditi Industri Unggulan	Fasilitasi Pendidikan, Pelatihan, Magang dan Studi Komparatif
			Meningkatnya Nilai Tambah Industri	Memfasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Industri	Pembinaan dan Pendampingan Pelaku Usaha Industri Kreatif
					Menyusun Dokumen Perencanaan Pengembangan Industri
					Pengembangan Sentra dan Kawasan Industri Unggulan
					Membangun Sarana dan Prasarana untuk pengembangan industri
		Memfasilitasi Pengadaan Peralatan Industri.			

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota Pariaman, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang. Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka Dinas Perindagkop dan UKM menetapkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2018 – 2023.

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Dinas Perindagkop dan UKM selama tahun 2018 – 2023 dapat dilihat pada Tabel 6.1 sebagai berikut :

**Tabel 6. 1 Program dan Kegiatan Dinas Perindagkop dan UKM**

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1	<b>Program Pelayanan administrasi Perkantoran</b>	Penyediaan jasa surat menyurat
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
		Penyediaan jasa administrasi keuangan
		Penyediaan jasa kebersihan kantor
		Penyediaan alat tulis kantor
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
		Penyediaan makanan dan minuman
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

2	<b>Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Pengadaan peralatan gedung kantor
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
		Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan/ perlengkapan kantor
3	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	Pendidikan dan pelatihan formal
4	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya
5	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	Penyusunan Laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
		Penyusunan Renstra OPD
6	<b>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</b>	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Simpan Pinjam
		Pengawasan koperasi
		Pembinaan Kelembagaan Koperasi
		Penilaian Koperasi Berprestasi
		Bimuluh Perkoperasian Bagi Kelompok Ekonomi Produktif
		Percepatan Pelaksanaan RAT
		Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian
		Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi
		Pelatihan Akuntansi Koperasi Bagi Pengurus
		Pelatihan Akuntansi bagi Pengawas Koperasi
		Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi
7	<b>Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif</b>	Klinik Konsultasi Bisnis dan Fasilitasi Kemasan bagi UMKM Kota Pariaman
		Temu Usaha Kemitraan dan Fasilitasi Pembiayaan bagi UMKM
8	<b>Program pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif</b>	Pelatihan Kewirausahaan dan Penyusunan Proposal Bantuan Usaha bagi Wirausaha Pemula (WP) Kota Pariaman

	<b>UMKM</b>	Pembinaan dan Pengawasan Koperasi dan UMKM Kota Pariaman
		Pembinaan UMKM Kota Pariaman
		Pelatihan Pembukuan Bagi UMKM
9	<b>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah</b>	Fasilitasi Sarana Usaha PKL
		Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi KUMKM
		Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah
10	<b>Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan</b>	Peringatan Hari Konsumen Nasional Tingkat Kota Pariaman
		Pemantauan dan Pengawasan di Bidang Perdagangan
		Pameran Pariaman Expo dan Pameran Pembangunan Kota Pariaman
		Promosi Produk Daerah
		Operasional Gedung Promosi/Gallery Kota Pariaman
		Bazar/Pasar Murah Sembako
		Fasilitasi Pengembangan Pasar
11	<b>Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan</b>	Pembinaan Organisasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan
12	<b>Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</b>	Pembinaan dan Pengembangan Klaster Industri Kota Pariaman
		Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri
		Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya
		Fasilitasi Pengembangan OVOP (One Village One Product)
		Pembinaan Industri Kerajinan Kota Pariaman
		Fasilitasi Pengembangan Industri Kreatif Kota Pariaman
		Promosi Produk industri kerajinan kota pariaman
		Fasilitasi Pengembangan Batik Sampan dan Festival Batik

		Fasilitasi Pengembangan Produk Olahan Pisang
		Fasilitasi Pengembangan Produk Sala Piaman
		Lomba Rancang Busana Aplikasi Kerajinan Khas Kota Pariaman
13	<b>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>	Koordinasi Program BDC

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Dinas Perindagkop dan UKM selama tahun 2018 – 2023 dapat dilihat pada **Tabel 6.2**.

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Dinas Perindagkop dan UKM sebagai OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman melaksanakan amanat tujuan dan sasaran RPJMD Kota Pariaman 2018-2023. Dalam melaksanakan amanat tujuan dan sasaran itu direpresentasikan oleh indikator kinerja. Indikator Kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggung-jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Dinas Perindagkop dan UKM yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

**Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Perindagkop dan UKM**

NO.	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA HITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA					KONDISI AKHIR
					2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase laju Pertumbuhan Koperasi sehat	Koperasi sehat adalah Koperasi yang dalam 2 (dua) tahun terakhir secara berturut - turut mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota	Data Koperasi sehat	7 Koperasi	2 %	3%	4%	5%	6%	6%
2	Persentase laju Pertumbuhan UMKM	Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha	Data Jumlah Usaha Mikro	2,40 %	2,40%	2,41%	2,43%	2,45%	2,46%	2,46%

	<p>perorangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut :</p> <p>a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau</p> <p>b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3	Persentase laju pertumbuhan sektor perdagangan	Jumlah Unit Usaha Perdagangan adalah Jumlah seluruh pedagang (formal dan informal). Hal ini mencakup seluruh pedagang di wilayah Kota Pariaman	Data Jumlah Usaha Perdagangan	2,00%	2,00%	2,01%	2,013%	2,15%	2,18%	2,18%
4	Persentase laju pertumbuhan sektor industri	Jumlah Unit IKM (Industri Kecil Menengah ) adalah Banyaknya satuan Usaha Industri yang berskala Kecil dan berskala Menengah. Dalam hal ini, IKM yang dimaksud adalah Industri Kecil Menengah yang ada	Data Jumlah Unit IKM	1,15%	1,15%	1,16%	1,17%	1,18%	1,19%	1,19%

		di wilayah Kota Pariaman.								
--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Untuk kesinambungan pembangunan khususnya di bidang Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman dibutuhkan perhatian semua pihak yang terkait, dengan persepsi serta tindakan yang sama agar pembangunan dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan masyarakat Kota Pariaman.

Sebagai salah satu Dinas yang memegang peranan dalam melaksanakan tugas Pemerintah Daerah dalam bidang ekonomi, Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman akan berupaya seoptimal mungkin mendukung terwujudnya Visi dan Misi Daerah Kota Pariaman.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman merupakan suatu langkah dalam mempersiapkan diri untuk mengantisipasi perkembangan di masa depan dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan. Dengan telah disusunnya Rencana Strategis ini diharapkan akan menjadi acuan bagi semua pihak yang terkait dimana tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan daya saing ekonomi kreatif seperti yang dicita-citakan bersama.

#### **8.1. PEDOMAN TRANSISI RKPD TAHUN 2024**

Renstra Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman Tahun 2018-2023 dapat digunakan sebagai pedoman transisi penyusunan dan acuan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2024. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan kegiatan dan program pembangunan dapat berlanjut, sedangkan Renstra Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman Tahun 2018-2023 telah habis masa berlakunya serta untuk mengisi kekosongan perencanaan pembangunan daerah tahun 2024, dimana tahun bersangkutan SKPD di Kota Pariaman sudah diharuskan menyusun Renja SKPD tahun 2024 sebagai pedoman dan acuan Rancangan KUA APBD Tahun 2024 yang diperlukan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Proses penyusunan Renstra SKPD dan RPJMD Tahun 2023-2028 memerlukan waktu cukup lama berdasarkan masa jabatan Walikota Terpilih hasil Pilkada tahun 2023. Selanjutnya Walikota sebagai Kepala Daerah Terpilih tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Renja SKPD dan rancangan RKPD tahun 2024 berikut penyusunan RKPD Tahun 2024.

## **8.2. KAJIDAH PELAKSANAAN**

Renstra Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman Tahun 2018-2023 merupakan jabaran dari pelaksanaan program pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Pariaman Tahun 2018-2023 khususnya urusan wajib, dan merupakan pedoman penyusunan Renja Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman Tahun 2020-2024 dan perencanaan penganggaran tahun 2020-2024. Renstra ini akan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindagkop dan UKM untuk tahun 2020, 2021, 2022, dan tahun 2023. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Renstra Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman Tahun 2018-2023 dilaksanakan dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman yang sepenuhnya dijalankan secara bersama dan diarahkan oleh Kepala Dinas dalam kewajiban menyelenggarakan pemerintah daerah urusan Wajib;
2. Penetapan target Indikator kinerja Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman dalam Renstra Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan pada Forum SKPD Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman dengan mempedomani Target Indikator Kinerja pada RPJMD Kota Pariaman tahun 2018-2023;
3. Renstra Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman Tahun 2018-2023 dilaksanakan dengan koordinator Kepala Dinas;
4. Renstra Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman Tahun 2018-2023 merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman tahun 2020-2024;

Tabel 6.2

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															Kondisi Kinerja Akhir Renstra (Akhir Tahun 2023)		Unit Kerja Penanggung jawab	
							TAHUN 2019			TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023			Target	Rp		
							Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp					
Meningkatnya Peran Koperasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi yang sehat	Persentase laju Pertumbuhan Koperasi sehat	Program Pelayanan administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Persentase terlayannya administrasi perkantoran	100%	100	%	418.746.000	100	%	801.937.400	100	%	505.539.400	100	%	510.589.400	100	%	514.589.400	100	%	2.451.401.600	SEKRETARIS
			Penyediaan jasa surat menyurat		Jumlah Materi yang Dtdsediakan	12 Bulan	466	Buah	1.998.000	466	Buah	1.998.000	466	Buah	2.200.000	466	Buah	2.250.000	466	Buah	250.000	2330	Buah	8.696.000	Kasubag Umum dan Program
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Jumlah kwh listrik yang dibayarkan	12 Bulan	2160	Kwh	72.000.000	2160	Kwh	72.000.000	2160	Kwh	72.000.000	2160	Kwh	72.000.000	2160	Kwh	72.000.000	10800	Kwh	72.000.000	Kasubag Umum dan Program
					Jumlah rek telepon yang dibayarkan	12 Bulan	6000	Menit	3.600.000	6000	Menit	3.600.000	6000	Menit	3.600.000	6000	Menit	3.600.000	6000	Menit	3.600.000	30000	Menit	3.600.000	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah perpanjangan izin surat kendaraan dinas/operasional	16 Unit	16	Unit	12.000.000	16	Unit	12.000.000	16	Unit	12.000.000	16	Unit	12.000.000	16	Unit	12.000.000	80	Unit	60.000.000	Kasubag Umum dan Program
			Penyediaan jasa administrasi keuangan		Jumlah jasa administrasi dan keuangan yang dibayarkan perbulannya	12 Bulan	16	Orang	151.200.000	16	Orang	177.300.000	80	Orang	860.400.000	Kasubag Umum dan Program									
			Penyediaan jasa kebersihan kantor		Jumlah jenis alat kebersihan kantor yang disediakan perbulannya	12 Bulan	7	Jenis	48.848.000	7	Jenis	6.419.400	35	Jenis	74.525.600	Kasubag Umum dan Program									
					Jumlah tenaga kebersihan kantor yang disediakan	4 Org	4	Org		4	Org	97.020.000	20	Org	388.080.000										
			Penyediaan alat tulis kantor		Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	12 Bulan	40	Jenis	20.000.000	40	Jenis	20.000.000	40	Jenis	22.000.000	40	Jenis	22.000.000	40	Jenis	25.000.000	200	Jenis	109.000.000	Kasubag Umum dan Program
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan dalam 1 tahun	12 Bulan	3	Jenis	15.000.000	3	Jenis	17.500.000	3	Jenis	17.500.000	3	Jenis	17.500.000	3	Jenis	20.000.000	15	Jenis	87.500.000	Kasubag Umum dan Program
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Jumlah penyediaan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	3	Jenis	3.000.000	3	Jenis	3.000.000	3	Jenis	3.500.000	3	Jenis	3.500.000	3	Jenis	3.500.000	15	Jenis	16.500.000	Kasubag Umum dan Program
			Penyediaan makanan dan minuman		Jumlah konsumsi untuk rapat-rapat dinas	12 Bulan	150	Kali	11.100.000	150	Kali	11.100.000	150	Kali	12.000.000	150	Kali	12.000.000	150	Kali	12.500.000	750	Kali	58.700.000	Kasubag Umum dan Program
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		Jumlah rapat dan konsultasi yang dilakukan ke provinsi, pusat, lintas SKPD, dll	12 Bulan	12	Bulan	80.000.000	12	Bulan	80.000.000	12	Bulan	80.000.000	12	Bulan	85.000.000	12	Bulan	85.000.000	60	Bulan	410.000.000	Kasubag Umum dan Program
			Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kondisi sarana dan prasarana aparatur	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik	95%	95	%	150.090.000	100	%	547.590.000	100	%	228.590.000	100	%	228.590.000	100	%	233.590.000	100	%	1.388.450.000	SEKRETARIS
			Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional		Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang disediakan	16 unit	-	-	-	1	unit	350.000.000	1	Unit	25.000.000	1	unit	25.000.000	1	unit	25.000.000	20	unit	425.000.000	Kasubag Umum dan Program
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	5 Jenis	5	Jenis	16.500.000	5	Jenis	24.000.000	5	Jenis	30.000.000	5	Jenis	30.000.000	5	Jenis	35.000.000	25	Jenis	135.500.000	Kasubag Umum dan Program
			Pengadaan peralatan gedung kantor		Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	6 Jenis	6	Jenis	-	6	Jenis	40.000.000	30	Jenis	160.000.000	Kasubag Umum dan Program									
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	16 Jenis	16	Unit	76.590.000	16	Unit	76.590.000	16	Unit	76.590.000	16	Unit	76.590.000	16	Unit	76.590.000	80	Unit	382.950.000	Kasubag Umum dan Program
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Jumlah gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	12 Bulan	3	Unit	28.500.000	3	Unit	28.500.000	3	Unit	28.500.000	3	Unit	28.500.000	3	Unit	28.500.000	15	Unit	142.500.000	Kasubag Umum dan Program
			Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor		Jumlah perlengkapan kantor yang mendapat pemeliharaan	12 Bulan	15	Jenis	28.500.000	15	Unit	28.500.000	75	Unit	142.500.000	Kasubag Umum dan Program									
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya wawasan pengetahuan, keterampilan & profesionalisme aparatur	Jumlah Pegawai Disperindag yang dibimtekkan	5 orang	5	orang	20.000.000	5	orang	20.000.000	5	orang	20.000.000	5	orang	20.000.000	5	orang	20.000.000	5	orang	100.000.000	SEKRETARIS
			Pendidikan dan pelatihan formal		Jumlah kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	5 Orang	5	org	20.000.000	5	org	20.000.000	5	org	20.000.000	5	org	20.000.000	5	org	20.000.000	25	org	100.000.000	Kasubag Umum dan Program
			Program peningkatan disiplin aparatur		Persentase peningkatan kualitas disiplin aparatur		0			100	%	33.750.000	100	%		100	%		100	%		100	%		SEKRETARIS
			Pengadaan Pakelan Dinas beserta kelengkapannya		Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	45 Orang	-	-	-	45	org	33.750.000	#VALUE!	org	#VALUE!	Kasubag Umum dan Program									

			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Meningkatnya kualitas laporan kinerja dan keuangan	3 Dokumen	3 dokumen	20.000.000	3 dokumen	20.000.000	3 dokumen	20.000.000	3 dokumen	20.000.000	4 dokumen	45.000.000	4 dokumen	125.000.000	SEKRETARIS				
			Penyusunan Laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Jumlah dokumen laporan capaian kinerja	3 Dokumen	3 dokumen	20.000.000	3 dokumen	20.000.000	3 dokumen	20.000.000	3 dokumen	20.000.000	3 dokumen	20.000.000	15 dokumen	100.000.000	Kasabag Umum dan Program				
			Penyusunan Renstra OPD		Jumlah dokumen rentra dan renja SKDP	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000						
	Koperasi		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Jumlah Koperasi Sehat	7 koperasi	8 Kop	152.283.000	9 Kop	412.020.000	10 Kop	853.180.000	11 Kop	961.470.000	12 Kop	1.011.470.000	50 Kop	3.390.423.000	Kabid Koperasi Dan UKM				
			Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Simpan Pinjam		Jumlah Usaha Simpan Pinjam yang dinilai	10 Koperasi	10 Kop	33.960.000	30 Kop	50.000.000	34 Kop	60.000.000	36 Kop	75.000.000	38 Kop	90.000.000	148 Kop	308.960.000					
			Pembiayaan Kelembagaan dan penilaian Koperasi berprestasi		Jumlah koperasi yang dibina	31 Koperasi	46 Kop	58.288.000	50 Kop	108.840.000	53 Kop	250.000.000	65 Kop	250.000.000	65 Kop	250.000.000	279 Kop	917.128.000					
					Jumlah Koperasi yang dinilai berprestasi	15	15 Kop		15 kop		17 Kop		20 Kop	58.290.000	20 Kop	58.290.000	87 Kop	116.580.000					
					Jumlah koperasi yang mengikuti RAT	20	20 kop	30.000.000	20 kop	45.000.000	25 kop	55.000.000	27 kop	60.000.000	30 kop	65.000.000	122 kop	255.000.000					
					Jumlah koperasi percontohan yang berbasis Informasi Teknologi (IT)	0	0 -	-			1 koperasi	35.000.000	1 koperasi	40.000.000	1 koperasi	45.000.000	3 koperasi	120.000.000					
					Jumlah koperasi yang melakukan kerjasama dengan BUMN	0	0 kop	-			11 kop	40.000.000	12 kop	50.000.000	13 kop	60.000.000	36 kop	150.000.000					
					Jumlah pengurus koperasi yang dilatih	0	0 org	-			40 org	40.000.000	40 org	40.000.000	40 org	40.000.000	120 org	120.000.000					
					Jumlah pengawas koperasi yang dilatih	0	0 org	-			40 org	40.000.000	40 org	40.000.000	40 org	40.000.000	120 org	120.000.000					
					Jumlah orang yang dilatih tentang manajemen pengelolaan koperasi	0	0 org	-			50 org	60.000.000	50 org	60.000.000	50 org	60.000.000	150 org	180.000.000					
					Jumlah koperasi berbasis syariah	0	0 Kop				25 Kop	60.000.000	25 Kop	65.000.000	30 Kop	70.000.000	80 Kop	195.000.000					
			Bimuluh Perkoperasian Bagi Kelompok Ekonomi Produktif		Jumlah bimuluh perkoperasian bagi LKM	4 LKM	4 LKM	30.035.000	4 LKM	45.000.000	4 LKM	50.000.000	4 LKM	60.000.000	4 LKM	70.000.000	4 LKM	255.035.000					
					Jumlah bimuluh perkoperasian bagi Koperasi	2 Koperasi	2 Koperasi		2 Koperasi		2 Koperasi		2 Koperasi		2 Koperasi		2 Koperasi						
			Pendataan KUMKM	Tersedianya data base KUMKM secara menyeluruh	Buku database Koperasi dan UMKM se Kota Parlamen	0	0	-	1 buku	163.180.000	1 buku	163.180.000	1 buku	163.180.000	1 buku	163.180.000	1 buku	163.180.000					
Meningkatnya Kontribusi UMKM terhadap Sektor Ekonomi	UMKM	Meningkatnya Pertumbuhan UMKM	Persentase Jaku Pertumbuhan UMKM	Program Penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	Meningkatnya iklim usaha UMKM yang kondusif	Persentase peningkatan UMKM	0	2	%	304.471.250	2	%	260.436.000	2	%	325.000.000	2	%	390.000.000	2	%	1.634.907.250	Kabid Koperasi Dan UKM
			Klinik Konsultasi Bisnis dan Fasilitasi Kemasan bagi UMKM Kota Pariaman		Jumlah pelaku UMKM yang melakukan konsultasi	75	240 UMKM	254.471.250	155 UMKM	190.436.000	260 UMKM	250.000.000	280 UMKM	280.000.000	300 UMKM	310.000.000	1235 UMKM	1.284.907.250					
			Temu Usaha Kemitraan dan Fasilitasi Pembiayaan bagi UMKM		Jumlah pertemuan temu usaha UMKM	80	10 UMKM	50.000.000	10 KUMKM	70.000.000	35 UMKM	75.000.000	35 UMKM	75.000.000	40 UMKM	80.000.000	130 UMKM	350.000.000					
			Program Pengembangan dan Keunggulan Kompetitif UMKM	Meningkatnya pengembangan usaha UMKM baru	Jumlah wirausahawan/UMKM baru	0	50 UMKM	50.000.000	60 UMKM	295.000.000	70 UMKM	400.000.000	80 UMKM	445.000.000	90 UMKM	485.000.000	90 UMKM	1.675.000.000					
			Pelatihan Kewirausahaan		Jumlah UMKM yang dilatih	0	50 UMKM	50.000.000	0	0	75 UMKM	95.000.000	120 UMKM	130.000.000	150 UMKM	150.000.000	395 UMKM	425.000.000					





			Pembiayaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri		Jumlah kelompok industri yang dibina	0	0	0	-	5	kelompok	350.000.000	5	kelompok	370.000.000	5	kelompok	380.000.000	5	kelompok	400.000.000	5	kelompok	1.500.000.000	
			Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap Pemantaatan Sumber Daya		Jumlah IKM yang difasilitasi	0	0	0	-	30	IKM	200.000.000	1	IKM	-	1	IKM	240.000.000	1	IKM	260.000.000	33	IKM	700.000.000	
			Fasilitasi Pengembangan OVOP (One Village One Product)		Jumlah IKM yang difasilitasi dan dilatih	0	20	IKM	167.865.500	20	IKM	90.000.000	20	IKM	195.000.000	20	IKM	200.000.000	20	IKM	210.000.000	100	IKM	862.865.500	
			Pembinaan Industri Kerajinan Kota Pariaman		Jumlah orang yang dilatih	120 Orang	120	Orang	374.100.000	100	Orang	374.100.000	100	Orang	377.841.000	100	Orang	450.000.000	100	Orang	475.000.000	520	Orang	2.051.041.000	
			Fasilitasi Pengembangan Industri Kreatif Kota Pariaman		Jumlah orang yang dilatih	40 Orang	40	Orang	206.765.500	40	Orang	208.300.000	40	Orang	246.000.000	40	Orang	210.383.000	40	Orang	286.000.000	200	Orang	1.157.448.500	
					Jumlah Pelatihan Bordiran	0	40	Orang		40	Orang		40	Orang		40	Orang		40	Orang		200	Orang		
					Jumlah Pelatihan Rajutan	3 Kelompok	40	Orang		40	Orang		40	Orang		40	Orang		40	Orang		200	Orang		
					Jumlah Galery aktif	2 unit	12	Bulan		12	Bulan		12	Bulan		12	Bulan		12	Bulan		60	Bulan		
			Promosi Produk industri kerajinan kota pariaman		Jumlah event Promosi	4 Event	4	Event	391.000.000	4	Event	341.000.000	4	Event	425.000.000	4	Event	495.910.000	4	Event	450.000.000	4	Event	2.102.910.000	
			Lomba Rancang Busana Aplikasi Kerajinan Khas Kota Pariaman		Jumlah event busana yang dilombakan	0	1	Event	133.300.000	0	Event	-	1	Event	150.000.000	0	0	-	1	Event	165.000.000	4	Event	448.300.000	
			Fasilitasi Pengembangan Batik Sampian dan Festival. Batik		Jumlah Pengembangan Batik Sampian	0	0	0	-	0	0	-	1	keg	200.000.000	1	keg	220.000.000	1	keg	250.000.000	3	keg	670.000.000	
					Jumlah Festival. Batik	0	0	0	-	1	Event	731.100.000	1	Event	750.000.000	1	Event	770.000.000	1	Event	780.000.000	4	Event	3.031.100.000	
			Pengembangan Produk Sala Piaman		Jumlah jenis Pengembangan Produk Sala Piaman	0	0	0	-	0	0		1	jenis	250.000.000	1	jenis	275.000.000	1	jenis	300.000.000	3	jenis	825.000.000	
			Pengembangan Produk Olahan Pisang		Jumlah jenis Pengembangan Produk Olahan Pisang	0	0	0	-	0	0	-	1	keg	350.000.000	1	keg	375.000.000	1	keg	400.000.000	3	keg	1.125.000.000	